

BAB 4

**GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN PROGRAM
MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH DIREKTORAT PEMBINAAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA**

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian yaitu dalam rangka mengkaji mengenai partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah di Kecamatan Kalideres, dengan fokus partisipasi masyarakat di Kecamatan Kalideres terhadap SMP Negeri 278 dan SMP Negeri 225 Jakarta Barat.

4.1.1 Keadaan Geografis

Kecamatan Kalideres secara administratif merupakan salah satu Kecamatan dari lima Kecamatan yang terdapat dalam wilayah Kotamadya Jakarta Barat Propinsi DKI Jakarta. Adapun letak geografis dari Kecamatan Kalideres ini adalah :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Penjaringan (Jakarta Utara) dan Kecamatan Benda (Kabupaten Tangerang).
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Cengkareng dan Kecamatan Cipondoh (Kota Tangerang).
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Cengkareng.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Batucapeper (Kota Tangerang).

Kecamatan Kalideres mempunyai luas wilayah 30,227 Ha yang terdiri dari lima Kelurahan yaitu Kelurahan Semanan, Kelurahan Kalideres, Kelurahan Pegadungan, Kelurahan Tegal Alur dan Kelurahan Kamal dengan jumlah total RW 72 dan RT 729.

4.1.2 Keadaan Pemerintahan

Keseluruhan jumlah penduduk Kecamatan Kalideres berdasarkan hasil registrasi pada akhir tahun 2008 tercatat sebanyak 250.348 jiwa terdiri atas 130.634 penduduk laki-laki dan 119.714 penduduk perempuan yang terbagi dalam 72.764 kepala keluarga dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 61 jiwa/Ha.

Tabel 2 Luas Wilayah, Jumlah RT,RW,KK, Penduduk dan Kepadatan penduduk

No.	Kelurahan	Luas wilayah (Ha)	Jumlah				Tingkat Kepadatan Penduduk per Ha
			RT	RW	KK	Penduduk	
1	Semanan	5,980	113	12	18.811	58.712	53
2	Kalideres	5,710	182	17	12.350	49.059	65
3	Pegadungan	8,668	182	18	15.428	45.281	52
4	Tegal Alur	4,976	159	16	17.245	65.446	47
5	Kamal	4,902	102	10	9.309	31.850	126

Sumber : Kependudukan Kecamatan, BPS Kota Administrasi Jakarta Barat, 2009.

Berdasarkan tabel 1 diatas, keadaan masing-masing kelurahan di Kecamatan Kalideres diuraikan sebagai berikut:

a. Kelurahan Semanan

Luas wilayah Kelurahan Semanan adalah 598 Ha terbagi dalam 12 RW, 113 RT dengan jumlah kepala keluarga sebesar 18.811 dan penduduk sebanyak 58.712 jiwa. Tingkat kepadatan penduduk di Kelurahan ini sebesar 53 jiwa/Ha.

b. Kelurahan Kalideres

Kelurahan Kalideres dengan luas wilayah 571 Ha dan jumlah penduduk sebesar 49.059 tersebar di 17 RW, 182 RT dan 12.350 KK dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 65 jiwa/Ha.

c. Kelurahan Pegadungan

Kelurahan Pegadungan dengan luas wilayah 866,8 Ha terbagi dalam 19 RW, 182 RT dan 15.428 KK, memiliki jumlah penduduk sebanyak 45.281 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 52 jiwa/Ha.

d. Kelurahan Tegal Alur

Kelurahan Tegal Alur dengan luas wilayah 497,6 Ha merupakan kelurahan yang memiliki jumlah penduduk paling banyak sebesar 65.446 jiwa. Dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 47 jiwa/Ha dan tersebar dalam 16 RW dan 159 RT dan 17.245 KK.

e. Kelurahan Kamal

Kelurahan Kamal dengan luas wilayah 490,2 Ha merupakan wilayah Kelurahan yang luas wilayahnya paling kecil dan paling tinggi tingkat kepadatan penduduknya di Kecamatan Kalideres. Kelurahan Kamal terbagi dalam 10 RW, 102 RT dan 9.309 KK, memiliki jumlah penduduk sebanyak 31.850 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 126 jiwa/Ha.

Jika dilihat dari persentase penggunaan luas tanah di Kecamatan Kalideres, 60,60 persen lahan tanah dimanfaatkan sebagai fasilitas perumahan, 9,81 persen untuk industri, dimanfaatkan untuk gedung kantor sekitar 4,54 persen dan hanya 1,33 persen yang dimanfaatkan sebagai area taman. Dilihat berdasarkan status kepemilikan tanah, sekitar 57,65 persen merupakan hak milik, HGB sekitar 24,99 persen, hak pakai sekitar 6,24 persen dan girik sekitar 11,12 persen.

4.1.3 Keadaan Demografis

Data kependudukan yang dapat disajikan sampai dengan wilayah administrasi terkecil, sangat berguna bagi perencanaan pembangunan, baik di bidang sosial, politik maupun ekonomi. Kebutuhan data kependudukan ini tidak cukup hanya dipenuhi dari data hasil sensus penduduk maupun hasil survei penduduk antar sensus, tetapi juga perlu dilengkapi dengan data hasil registrasi penduduk yang dilaksanakan secara berkesinambungan di setiap kelurahan.

Registrasi merupakan kumpulan keterangan mengenai terjadinya peristiwa lahir dan mati serta segala kejadian penting yang merubah status sipil seseorang yang dimulai sejak saat dilahirkan sampai kematiannya, meliputi peristiwa perkawinan, perceraian serta perpindahan.

Tabel 3 Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin, Sex Rasio

No.	Kelurahan	Jumlah Penduduk		Jumlah	Sex Ratio
		Laki-laki	Perempuan		
1	Semanan	30.149	28.563	58.712	106
2	Kalideres	26.370	22.689	49.059	116
3	Pegadungan	23.099	22.182	45.281	104
4	Tegal Alur	34.552	30.894	65.446	112
5	Kamal	16.464	15.386	31.850	107

Sumber : Survei Fisik Perkotaan, BPS Kota Administrasi Jakarta Barat, 2009.

Tabel 4 Banyaknya Penduduk menurut Kewarganegaraan dan Jenis Kelamin

No.	Kelurahan	WNI			WNA		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Semanan	30.149	28.563	58.712	-	-	-
2	Kalideres	26.370	22.689	49.059	-	-	-
3	Pegadungan	23.099	22.182	45.281	5	-	5
4	Tegal Alur	34.552	30.894	65.446	3	-	3
5	Kamal	16.464	15.386	31.850	-	-	-

Sumber : Survei Fisik Perkotaan, BPS Kota Administrasi Jakarta Barat, 2009.

Berdasarkan hasil registrasi penduduk akhir tahun 2008 tercatat bahwa jumlah penduduk Kecamatan Kalideres sebanyak 250.409 jiwa yang terdiri dari 130.634 jiwa penduduk laki-laki dan 119.714 jiwa penduduk perempuan.

Bila dilihat dari status kewarganegaraannya, penduduk Kecamatan Kalideres terbagi atas 130.634 jiwa penduduk WNI laki-laki dan 119.714 jiwa penduduk WNI perempuan, sedangkan penduduk WNA tercatat sebanyak 8 orang yang terdiri atas 8 orang penduduk WNA laki-laki (Tabel 2 dan tabel 3).

Tabel 5 Banyaknya Penduduk menurut Agama yang Dianut

No.	Kelurahan	Islam	Katolik	Protestan	Hindu	Buddha	Jumlah
1	Semanan	56.349	384	336	315	1.328	58.712
2	Kalideres	44.120	2.571	1.410	321	637	49.059
3	Pegadungan	35.819	2.669	3.719	292	2.782	45.281
4	Tegal Alur	56.386	982	4.317	3.540	221	65.446
5	Kamal	28.355	608	327	66	2.494	31.850

Sumber : Survei Fisik Perkotaan, BPS Kota Administrasi Jakarta Barat, 2009.

Ditinjau berdasarkan agama yang dianut, jumlah penduduk Kecamatan Kalideres mayoritas beragama Islam yaitu mencapai 88,02 persen, berikutnya adalah penganut agama katolik sebesar 2,97 persen, penganut agama Kristen Protestan sebesar 3,88 persen, agama Hindu sebesar 1,59 persen dan agama Budha sekitar 3,54 persen (Tabel 4).

Tabel 6 Banyaknya Penduduk yang Lahir dan Mati menurut Jenis Kelamin

No.	Kelurahan	Lahir			Mati		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Semanan	6	2	8	55	26	81
2	Kalideres	8	8	16	47	31	78
3	Pegadungan	34	25	59	30	36	66
4	Tegal Alur	4	4	8	18	14	32
5	Kamal	6	6	12	33	36	69

Sumber : Survei Fisik Perkotaan, BPS Kota Administrasi Jakarta Barat, 2009.

Kelahiran dan kematian merupakan komponen-komponen yang dapat mempengaruhi angka pertumbuhan penduduk yang berfungsi sebagai keseimbangan yang dinamis antara kekuatan-kekuatan yang menambah dan kekuatan-kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk.

Kelahiran yang tercatat pada tahun 2008 mengalami penurunan hingga mencapai 30,73 persen dibanding tahun 2007, dengan jumlah kelahiran sebesar 103 jiwa. Tingkat kelahiran tertinggi terdapat di Kelurahan Pegadungan sebanyak 59 jiwa dan yang terendah di Kelurahan Tegal Alur sebanyak 8 kelahiran. Demikian pula, untuk peristiwa kematian mengalami penurunan sebesar 27,26 persen (326 jiwa) dibanding tahun 2007. Jumlah kematian tertinggi terjadi di Kelurahan Semanan sebanyak 81 jiwa, sedangkan jumlah kematian terendah terjadi di Kelurahan Tegal Alur sebanyak 32 jiwa. (Tabel 5).

Tabel 7 Banyaknya Penduduk yang Datang dan Pindah menurut Jenis Kelamin

No.	Kelurahan	Datang			Pindah		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Semanan	15	7	22	61	20	81
2	Kalideres	30	16	46	65	35	100
3	Pegadungan	68	70	138	73	45	118
4	Tegal Alur	22	7	29	13	15	8
5	Kamal	28	44	72	28	53	81

Sumber : Survei Fisik Perkotaan, BPS Kota Administrasi Jakarta Barat, 2009.

Selain komponen kelahiran dan kematian, perpindahan penduduk juga merupakan komponen penting yang mempengaruhi angka pertumbuhan penduduk, dimana migrasi masuk akan menambah angka pertumbuhan penduduk dan migrasi keluar akan mengurangi angka pertumbuhan penduduk, sedangkan selisih antara migrasi masuk dengan migrasi keluar disebut migrasi neto.

Berdasarkan tabel 6, sampai dengan akhir tahun 2008, jumlah penduduk migran yang datang ke Kecamatan Kalideres mencapai 307 jiwa yang terdiri dari 163 laki-laki dan 144 perempuan, sedangkan penduduk yang meninggalkan Kecamatan Kalideres tercatat sebanyak 408 jiwa.

Tabel 8 Banyaknya Penduduk Musiman menurut Daerah Asal

No.	Kelurahan	Jawa Timur	Jawa Tengah	Jawa Barat	Luar Jawa	Lainnya	Jumlah
1	Semanan	434	494	405	47	4	1.384
2	Kalideres	177	1.236	247	65	27	1.752
3	Pegadungan	417	60	170	16	2	665
4	Tegal Alur	1907	255	709	16	8	3.040
5	Kamal	622	989	862	68	61	2.602

Sumber : Survei Fisik Perkotaan, BPS Kota Administrasi Jakarta Barat, 2009.

Adapun jumlah penduduk musiman yang tercatat di Kecamatan Kalideres adalah sebanyak 9.443 jiwa, dimana 48,22 persen diantaranya berasal dari Propinsi Jawa Timur, 22 persen berasal dari Propinsi Jawa Tengah, berikutnya 25,63 persen berasal dari Propinsi Jawa Barat sedangkan sisanya berasal dari luar Jawa sebesar 4,14 persen (Tabel 7).

Tabel 9 Banyaknya Kepala keluarga menurut Lapangan Pekerjaan

No.	Kelurahan	Lapangan Pekerjaan				
		Pertanian	Industri	Bangunan	Trans/Kom	Keuangan
1	Semanan	35	6.124	1.906	725	80
2	Kalideres	5	3.042	840	748	246
3	Pegadungan	645	1.786	1.358	416	84
4	Tegal Alur	610	5.708	1.656	1.562	249
5	Kamal	621	5.639	446	296	18

No.	Kelurahan	Lapangan Pekerjaan				
		Pemerintahan	Jasa lainnya	Lainnya	Perdagangan	Jumlah
1	Semanan	670	969	3.093	5.209	18.811
2	Kalideres	704	3.755	1.995	1.015	12.350
3	Pegadungan	885	4.296	4.170	1.788	15.428
4	Tegal Alur	2.794	844	543	3.279	17.245
5	Kamal	118	1.522	121	528	9.309

Sumber : Survei Fisik Perkotaan, BPS Kota Administrasi Jakarta Barat, 2009.

Sementara itu bila dilihat dari lapangan pekerjaannya berdasarkan tabel 4.3.7, jumlah kepala keluarga di Kecamatan Kalideres sebagian besar bekerja di sektor industri yaitu sekitar 30,01 persen selebihnya bekerja di sektor jasa sekitar

16,65 persen, di sektor perdagangan sekitar 15,01 persen dan paling sedikit bekerja di sektor keuangan hanya sekitar 0,99 persen (Tabel 8).

4.1.4 Pendidikan

Pembangunan yang telah dilaksanakan di Kecamatan Kalideres mengacu pada tujuan pembangunan regional Jakarta Barat sesuai dengan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya yang tangguh, cerdas, terampil dan mandiri, produktif, kreatif, inovatif serta berorientasi ke masa depan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik. Termasuk dalam proses pembangunan ini adalah usaha masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya, tidak saja berupa kebutuhan fisik seperti makanan, pakaian dan perumahan tetapi juga kebutuhan non fisik seperti pendidikan, status sosial dan kesempatan kerja.

Berikut ini disajikan data tentang jumlah gedung sekolah dan jumlah sekolah di Kecamatan Kalideres :

Tabel 10 Banyaknya Gedung dan Sekolah TK

No.	Kelurahan	Gedung			Sekolah		
		TK	TPA	JML	TK	TPA	JML
1	Semanan	12	-	12	10	-	10
2	Kalideres	8	-	8	17	-	17
3	Pegadungan	8	-	8	23	-	23
4	Tegal Alur	10	-	10	17	-	17
5	Kamal	9	-	9	9	-	9

Sumber : Survei Fisik Perkotaan, BPS Kota Administrasi Jakarta Barat, 2009.

Tabel 11 Banyaknya Gedung dan Sekolah SD Menurut Status Sekolah

No.	Kelurahan	Gedung			Sekolah		
		Negeri	Swasta	JML	Negeri	Sekolah	JML
1	Semanan	14	6	20	14	7	21
2	Kalideres	18	5	23	13	5	18
3	Pegadungan	15	6	21	16	11	27
4	Tegal Alur	11	10	21	21	5	26
5	Kamal	10	2	12	11	5	16

Sumber : Survei Fisik Perkotaan, BPS Kota Administrasi Jakarta Barat, 2009.

Tabel 12 Banyaknya Gedung dan Sekolah SMP Menurut Status Sekolah

No.	Kelurahan	Gedung			Sekolah		
		Negeri	Swasta	JML	Negeri	Sekolah	JML
1	Semanan	2	-	2	2	6	8
2	Kalideres	2	5	7	2	8	10
3	Pegadungan	3	6	9	3	3	6
4	Tegal Alur	4	1	5	1	3	4
5	Kamal	3	5	8	4	4	8

Sumber : Survei Fisik Perkotaan, BPS Kota Administrasi Jakarta Barat, 2009.

Tabel 13 Banyaknya Gedung dan Sekolah SMA Menurut Status Sekolah

No.	Kelurahan	Gedung			Sekolah		
		Negeri	Swasta	JML	Negeri	Sekolah	JML
1	Semanan	1	2	3	1	2	3
2	Kalideres	1	3	4	1	3	4
3	Pegadungan	1	5	6	1	5	6
4	Tegal Alur	1	7	8	1	7	8
5	Kamal	-	1	1	-	1	1

Sumber : Survei Fisik Perkotaan, BPS Kota Administrasi Jakarta Barat, 2009.

Untuk jumlah gedung SD Negeri sebanyak 68 unit dan jumlah sekolah SD Negeri sebanyak 75 buah. Sedangkan jumlah gedung SD Swasta sebanyak 29 unit dan jumlah sekolah SD swasta sebanyak 30 buah.

Untuk tingkat SMP, jumlah gedung SMP negeri sebanyak 14 unit dan jumlah sekolah SMP Negeri sebanyak 12 buah. Sedangkan jumlah gedung SMP swasta sebanyak 17 unit dan jumlah sekolah SMP Swasta sebanyak 24 buah. Sementara itu, jumlah gedung SMA Negeri dan swasta sama dengan jumlah sekolahnya yaitu masing-masing sebanyak 4 unit/sekolah dan 18 unit/sekolah.

Tabel 14 Banyaknya jumlah siswa SD dan SMP menurut status sekolah

No.	Jenjang Sekolah	Status Sekolah		
		Negeri	Swasta	JML
1	SD	27.527	5.806	33.333
2	SMP	6.904	12.389	19.293

Sumber : Seksi Pendidikan Dasar Kecamatan Kalideres, 2009.

4.1.5 Profil Sekolah

Di dalam gambaran umum lokasi penelitian termasuk di dalamnya profil SMP Negeri 278 Jakarta Barat dan SMP Negeri 225 Jakarta Barat yang akan dijelaskan secara singkat, sebagai berikut :

4.1.5.1 SMP Negeri 278 Jakarta Barat

SMP Negeri 278 Jakarta Barat merupakan salah satu SMP negeri yang berada di Kecamatan Kalideres, yang masih berstatus sekolah negeri potensial. SMP Negeri 278 memiliki luas tanah sebesar 2.740 m², milik pemerintah dengan nomor sertifikat 4066/1997. Sebagian besar tanah diisi dengan gedung permanen

seluas 7.032 m² yang terdiri dari ruang kelas 1.071 m² dengan jumlah ruangan sebanyak 17 ruang, sedangkan lahan lainnya diisi dengan ruang guru 21 m², ruang kepala sekolah 42 m², ruang administrasi 42 m², lapangan upacara/olahraga 442,5 m², kantin 83 m² dan lain-lain.

Jumlah siswa di SMP Negeri 278 yaitu 622 orang, yang terbagi dalam tiga tingkat kelas. Kelas VII berjumlah 199 orang yang terdiri dari 5 rombongan belajar, siswa kelas VIII berjumlah 239 orang yang terdiri dari 6 rombongan belajar dan jumlah siswa kelas IX sebanyak 181 orang yang terdiri dari 5 rombongan belajar.

Visi SMP Negeri 278 yaitu “Cerdas, Intelektual, Cerdas Emosional, Cerdas Spiritual”. Visi ini untuk tujuan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek yang menjiwai warga sekolah untuk selalu mewujudkan setiap saat dan berkelanjutan mencapai tujuan sekolah. Sedangkan misi SMP Negeri 278 yaitu “Disiplin dalam Kinerja, Mewujudkan Manajemen Silaturahmi”. Di setiap kerja komunitas pendidikan, sekolah selalu menumbuhkan disiplin sesuai aturan bidang kerja masing-masing, saling menghormati dan saling percaya dan tetap menjaga hubungan kerja yang harmonis dengan berdasarkan kerja sama silaturahmi.

Sesuai dengan standar kompetensi nasional, SMP Negeri 278 memiliki tujuan sebagai berikut:

- a) Mampu menampilkan kebiasaan sopan santun dan berbudi pekerti sebagai cerminan akhlak mulia dan iman takwa;
- b) Mampu berbahasa Inggris secara aktif;
- c) Mampu berbagai seni olahraga sesuai pilihannya;
- d) Mampu mendalami cabang pengetahuan yang dipilih;
- e) Mampu mengoperasikan komputer aktif untuk program microsoft word dan excel dan desain grafis;
- f) Mampu melanjutkan ke SMA/SMK terbaik sesuai pilihannya melalui pencapaian target pilihan yang ditentukan sendiri;

- g) Mampu bersaing dalam mengikuti berbagai kompetisi akademik dan non akademik di tingkat Kecamatan, Kotamadya, Propinsi dan Nasional;
- h) Mampu memiliki kecakapan hidup personal, sosial, environment dan pre vocational.

Dari segi kelengkapan sarana dan prasarana, SMP Negeri 278 memiliki

- a) ruang laboratorium IPA yang terdiri dari sarana laboratorium sains fisika dan sarana laboratorium biologi;
- b) lapangan olahraga untuk berbagai jenis olahraga seperti bola voly, bola basket, sepak bola, dan olahraga lainnya;
- c) sarana lainnya berupa ruang perpustakaan yang berisi buku-buku pelajaran dan buku ilmiah dan;
- d) ruang lab komputer yang berisi 20 set komputer dilengkapi dengan pendingin ruangan dan fasilitas internet.

Dari segi pembelajaran, SMP Negeri 278 pada tahun 2009 telah mengimplementasikan kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dalam proses belajar mengajar. Hasil belajar siswa yang dipertimbangkan untuk mengetahui ketercapaian unggulan program akademik tahun 2009-2010, ditentukan melalui dari kulminasi hasil belajar akhir semester satu dan semester dua. Dalam manajemen quality assurance atau penjagaan mutu Nilai Hasil Belajar Siswa (NHBS) atau raport semester satu dan semester dua, sekolah melakukan pengendalian mutu atau quality control dari perkembangan nilai uji kompetensi harian (NK), rata-rata nilai harian Rt NK, nilai uji kompetensi blok (NB) sehingga mutu NHBS dapat terjaga mutunya sesuai dengan KKM. Untuk akhir tahun pelajaran, sekolah mempertimbangkan hasil ujian nasional sebagai mutu hasil belajar dari rata-rata Ujian Nasional. Peringkat Ujian Nasional tingkat Propinsi menjadi titik ukur keberhasilan belajar siswa selama 3 (tiga) tahun pelajaran.

Tabel 15 Data Hasil Belajar Siswa kelas IX dari Ujian Nasional

No.	Mata Pelajaran	2007-2008			
		Nilai Rata-rata	Jumlah	Peringkat Mapel	Peringkat Jumlah
1.	Bahasa Indonesia	7.51	27.29	163	192
2.	Matematika	6.29		194	
3.	Bahasa Inggris	6.25		188	
4.	IPA	6.97		177	

Sumber : Bagian Tata Usaha SMP Negeri 278 Jakarta Barat, 2009

4.1.5.2 Profil SMP Negeri 225 Jakarta Barat

SMP Negeri 225 Jakarta Barat merupakan satu-satunya SMP Negeri yang berstatus Sekolah Standar Nasional (SSN) dengan akreditasi A di Kecamatan Kalideres. Sekolah yang mendapatkan status SSN pada tahun 2008 ini memiliki lokasi yang sangat strategis yaitu di Jalan Warung Gantung Kampung Kojan, Kalideres, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, tidak jauh dari Bandara Sukarno Hatta sebagai gerbang masuk ke Indonesia.

SMP Negeri 225 Jakarta Barat mempunyai luas tanah sebesar 9.780 m², milik pemerintah dengan luas bangunan gedung permanen sebesar 3.996 M². Rincian prasarana bangunan sekolah antara lain : 1) Ruang Kepala Sekolah; 2) Ruang Guru ; 3) Ruang Wakil Kepala Sekolah; 4) Ruang Administrasi 5) Ruang Kelas; 6) Ruang Mushola; 7) Ruang Laboratorium; 8) Ruang Perpustakaan; 9) Ruang Komputer; 10) Ruang Media Audio; 11) Ruang Rapat; 12) Ruang OSIS; 13) Ruang Pramuka; 14) Ruang BP / BK; 15) Ruang Ketrampilan; 16) Ruang Kantin Sekolah dan ruangan lain serta Lapangan Upacara, Kebun Sekolah, Taman Sekolah dan Aula Sekolah.

Visi SMP Negeri 225 adalah “unggul dalam prestasi dan terampil berdasarkan budi pekerti”, dan memiliki misi “meningkatkan disiplin, meningkatkan budi pekerti, meningkatkan proses belajar, meningkatkan hasil belajar, dan meningkatkan hasil ekstrakurikuler.

Tujuan SMP Negeri 225 dalam penyelenggaraan pendidikan bagi seluruh siswa antara lain :

- a. Sekolah mampu memenuhi/menghasilkan pemetaan standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, dan aspek untuk kelas VII-IX semua mata pelajaran.
- b. Sekolah mampu memenuhi/menghasilkan RPP untuk kelas VII-IX semua mata pelajaran.
- c. Sekolah mampu memenuhi/menghasilkan standar isi (kurikulum satuan pendidikan/KBK, meliputi: telah tercapai/ telah dibuat kurikulum tingkat satuan pendidikan, silabus lengkap, model/sistem penilaian lengkap, RPP lengkap.
- d. Sekolah mampu memenuhi/menghasilkan standar proses pembelajaran meliputi: telah tercapai/ telah dibuat/ditetapkan melaksanakan pembelajaran dengan strategi/metode: CTL, pendekatan belajar tuntas, pendekatan pembelajaran individual secara lengkap
- e. Sekolah mampu memenuhi/menghasilkan standar pendidik dan tenaga kependidikan meliputi: semua guru berkualifikasi minimal S1, telah mengikuti PTBK, semua mengajar sesuai bidangnya, dan lain-lain.
- f. Sekolah mampu memenuhi/menghasilkan standar sarpras/fasilitas sekolah meliputi: semua sarpras, fasilitas, peralatan, dan perawatan memenuhi SPM.
- g. Sekolah mampu memenuhi/menghasilkan standar pengelolaan sekolah meliputi: pencapaian standar pengelolaan : pembelajaran, kurikulum, sarpras, SDM, kesiswaan, administrasi, dan lain-lain secara lengkap.
- h. Sekolah mampu memenuhi/menghasilkan standar penilaian pendidikan yang relevan.
- i. Sekolah mampu memenuhi pengembangan budaya mutu sekolah yang memadai.

- j. Sekolah mampu mewujudkan lingkungan sekolah dengan menerapkan 6K secara lengkap.

Komunitas pendidikan di SMP Negeri 225 bertanggung jawab mengembangkan bakat, minat dan kemampuan. Adapun jumlah keseluruhan siswa di SMP Negeri 225 adalah 925 siswa, dengan perincian sebagai berikut : Jumlah siswa kelas VII sebanyak 316 Siswa, yang terdiri dari laki-laki sebanyak 161 siswa dan perempuan sebanyak 155 siswa. Jumlah siswa Kelas VIII sebanyak 299 siswa, yang terdiri dari laki – laki sebanyak 154 siswa dan perempuan sebanyak 145 siswa. Jumlah siswa Kelas IX sebanyak 310 siswa yang terdiri dari laki – laki sebanyak 144 siswa dan perempuan sebanyak 166 siswa.

Kinerja sekolah SMPN 225 yang mengimplementasikan konsep Manajemen Mutu Berbasis Sekolah didukung oleh orang tua siswa kelas VII, VIII dan IX, dengan kekuatan karakteristik pendidikan dan latar belakang pekerjaan sesuai hasil data dari penerimaan siswa kelas VII pada tahun 2008 sebanyak 316 siswa, diperoleh data antara lain:

Pendidikan

S2 = tidak ada

S1 = 13 orang

SLTA = 199 orang

SMP/SD = 182 orang

Tidak Sekolah = 2 Orang

Pekerjaan

PNS = 7 orang

Karyawan = 71 orang

TNI = 4 orang

Wiraswasta = 133 orang

Buruh = 100 orang

Tidak Kerja = 2 orang

Penghasilan

Kurang dari Rp. 500.0000,- = 109 Orang

Rp.500.000 – 1.000.000,- = 126 Orang

Rp. 1.000.000 – Rp.1.500.000 = 46 Orang

Rp.1.500.000-2.000.000,- = 8 Orang

Lebih dari Rp. 2.000.000, = 27 Orang

(Data dari Bagian Tata usaha SMP Negeri 225 Jakarta Barat)

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, SMPN 225 Jakarta menyediakan sarana prasarana yang memenuhi syarat meskipun belum cukup. Hal tersebut meliputi sarana fisik gedung/kelas, kantor, tempat ibadah, lapangan olahraga, laboratorium, perpustakaan, sarana air bersih, alat komunikasi, WC, kantin, dan UKS. Sarana prasarana yang vital yang belum terealisasi antara lain , ruang multimedia, dan ruang Pramuka, ruang Komite,tempat parkir guru serta sarana kebersihan yang memadai.

SMPN 225 Jakarta memiliki sejumlah media pembelajaran guna menunjang proses belajar mengajar meskipun belum memadai. Beberapa media tersebut adalah OHP, televisi, laptop, LCD, alat peraga, alat praktikum, peta, globe, VCD pembelajaran tetapi alat-alat tersebut masih sangat terbatas.

Buku dalam proses belajar mengajar merupakan salah satu media dan sumber belajar yang sangat signifikan menentukan hasil belajar. Untuk KTSP, sementara ini dengan biaya dari BOS, buku yang sudah dimiliki untuk dipinjamkan kepada setiap siswa adalah buku teks mata pelajaran matematika dan bahasa Inggris. Untuk mata pelajaran yang lain masih belum memiliki. LKS yang disusun oleh MGMP DKI Jakarta masih menjadi salah satu media dan sumber belajar yang signifikan untuk menutupi kekurangan tersebut. Namun demikian ada beberapa diktat yang disusun oleh guru yang ada di SMP Negeri 225 Jakarta.

SMPN 225 Jakarta pada saat ini menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan untuk kelas VII, VIII, dan IX dengan tingkat kelulusan

sebesar 100% dan sebagian besar dari siswa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Tabel 16 Data Rata-rata Nilai UAN siswa selama 5 tahun (2004 – 2009)

No.	Bidang Studi	2004/2005	2005/2006	2006/2007	2007/2008	2008/2009
1	PKn	6.87	6.92	7.35	7.21	7.86
2	B.Indonesia	6.74	6.91	7.36	7.70	7.40
3	Matematika	6.38	6.97	6.55	6.33	6.11
4	B.Ingggris	5.27	6.21	6.62	6.61	6.45
5	IPA	5.78	5.14	5.74	7.25	5.78
6	IPS	5.63	5.23	6.35	6.70	6.82
	Rata-rata	36.67	37.38	39.97	41.79	40.42
	Rata-rata UN	6.04	6.31	6.57	6.96	6.44

Sumber : Bagian Tata Usaha SMP Negeri 225 Jakarta Barat

4.2 Program Manajemen Berbasis Sekolah Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama

Departemen Pendidikan Nasional telah menetapkan kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah di seluruh Indonesia sesuai dengan visi dan misi pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Berikut ini akan dijelaskan mengenai kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah secara singkat.

4.2.1 Sejarah singkat

Seiring dengan perkembangan dan dinamika politik di Indonesia pada tahun 1997, dimana telah terjadi reformasi dalam berbagai aspek pemerintahan, maka lahirlah kebijakan pendidikan di tingkat SMP pada tahun 1999 model pengelolaan sekolah yang disebut dengan Manajemen Peningkatan Mutu

Berbasis Sekolah (MPMBS). Kebijakan MPMBS ini berlaku untuk seluruh SMP di Indonesia, namun demikian pemerintah melalui Direktorat Pembinaan SMP (pada saat itu disebut dengan Direktorat Pendidikan Lanjutan Pertama) telah menetapkan sebanyak 3000 sekolah sebagai rintisan MPMBS selama kurun waktu 1999-2003 untuk melaksanakan MPMBS secara intensif dengan cara memberikan dana bantuan atau block grant yang disebut dengan BOMM (Bantuan Operasional Manajemen Mutu) selama tiga tahun.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Direktorat PLP pada saat itu untuk memasyarakatkan dan mendorong terlaksananya MPMBS ini pada sekolah-sekolah rintisan tersebut. Salah satu diantaranya adalah dengan melaksanakan pelatihan (*workshop*) MPMBS dari tahun 1999 sampai dengan 2003. Dalam pelatihan ini pesertanya adalah kepala sekolah, guru senior, dan ketua BP3 dari sekolah yang bersangkutan. Diharapkan setelah mengikut pelatihan peserta mampu mensosialisasikan MPMBS ini kepada seluruh warga sekolah dan masyarakat. Di samping itu, yang paling utama adalah sekolah mampu menerapkan dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolahnya masing-masing untuk meningkatkan mutu pendidikan beserta hasil-hasilnya melalui otonomi sekolah yang lebih luas dengan menerapkan prinsip-prinsip yang ada pada MPMBS.

Selain melaksanakan pelatihan MPMBS, Direktorat PLP saat itu juga memberikan stimulan kepada semua SMP rintisan tersebut berupa bantuan MPMBS yaitu yang saat itu disebut dengan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM). Sekolah yang mendapatkan bantuan MPMBS tersebut dipersyaratkan untuk membuat dan mengajukan proposal atau Rencana dan Program Pengembangan Sekolah (RPPS), sesuai dengan Buku Panduan MPMBS seperti yang dilatihkan. Telah ditetapkan bahwa dalam tiap periode waktu tertentu sekolah diminta laporan pelaksanaan MPMBS untuk mengetahui tingkat keterlaksanaannya maupun peningkatan keberhasilan pendidikan (mutu) yang dicapai, baik kepada dinas pendidikan kabupaten/kota, propinsi maupun

Direktorat SLTP (Kajian Pelaksanaan MPMBS dan MBS, Departemen Pendidikan Nasional 2009).

4.2.2 Pengertian MPMBS

Secara umum, manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah (MPMBS) dapat diartikan sebagai model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah, memberikan fleksibilitas/keluwesannya kepada sekolah, dan mendorong partisipasi langsung warga sekolah (guru, siswa, kepala sekolah, karyawan) dan masyarakat (orang tua siswa, tokoh masyarakat, pemerhati pendidikan, LSM dsb) untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan otonomi yang lebih besar, maka sekolah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengelola sekolahnya, sehingga sekolah lebih mandiri. Dengan kemandiriannya, sekolah lebih berdaya dalam mengembangkan program-program yang, tentu saja, lebih sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimilikinya. Dengan fleksibilitas/keluwesannya, sekolah akan lebih lincah dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya sekolah secara optimal. Demikian juga, dengan partisipasi/pelibatan warga sekolah dan masyarakat secara langsung dalam penyelenggaraan sekolah, maka rasa memiliki mereka terhadap sekolah dapat ditingkatkan. Peningkatan rasa memiliki ini akan meningkatkan akan menyebabkan peningkatan rasa tanggung jawab, dan peningkatan rasa tanggung jawab akan meningkatkan dedikasi warga sekolah dan masyarakat pendidikan. Inilah esensi partisipasi warga sekolah dan masyarakat dalam pendidikan. Baik peningkatan otonomi sekolah, fleksibilitas pengelolaan sumber daya maupun partisipasi warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan sekolah tersebut kesemuanya ditujukan untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Otonomi dapat diartikan sebagai kewenangan/kemandirian yaitu kemandirian dalam mengatur dan mengurus dirinya sendiri. Kemandirian dalam

program dan pendanaan merupakan tolak ukur utama kemandirian sekolah. Otonomi sekolah dapat diartikan kewenangan sekolah untuk mengatur dan mengurus kepentingan warga sekolah menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi warga sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan pendidikan nasional yang berlaku.

Fleksibilitas dapat diartikan sebagai keluwesan yang diberikan kepada sekolah untuk mengelola, memanfaatkan dan memberdayakan sumber daya sekolah seoptimal mungkin untuk meningkatkan mutu sekolah. Dengan keluwesan yang besar yang diberikan kepada sekolah, maka sekolah akan lebih lincah dan tidak harus menunggu arahan dari atasannya untuk mengelola, memanfaatkan dan memberdayakan sumber dayanya.

Peningkatan partisipasi yang dimaksud adalah penciptaan lingkungan yang terbuka dan demokratis, dimana warga sekolah dan masyarakat didorong untuk terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan pendidikan, mulai dari pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan yang diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan. Hal ini dilandasi oleh keyakinan bahwa jika seseorang dilibatkan (berpartisipasi) dalam penyelenggaraan pendidikan maka yang bersangkutan akan memiliki rasa memiliki terhadap sekolah, sehingga yang bersangkutan juga akan bertanggung jawab dan berdedikasi sepenuhnya untuk mencapai tujuan sekolah.

MPMBS bertujuan untuk memandirikan atau memberdayakan sekolah melalui pemberian kewenangan (otonomi) kepada sekolah, pemberian fleksibilitas yang lebih besar kepada sekolah untuk mengelola sumber daya sekolah, dan mendorong partisipasi warga sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan. Lebih rincinya, MPMBS bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan kemandirian, fleksibilitas, partisipasi, ketebukaan, kerjasama, akuntabilitas, sustainabilitas, dan inisiatif sekolah dalam mengelola, memanfaatkan dan memberdayakan sumberdaya yang tersedia; meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam

penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama; meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua, masyarakat dan pemerintah tentang mutu sekolahnya dan meningkatkan kompetensi yang sehat antar sekolah tentang mutu pendidikan yang akan dicapai.

MPMBS diterapkan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut: 1) Dengan pemberian otonomi yang lebih besar kepada sekolah, maka sekolah akan lebih inisiatif dalam meningkatkan mutu sekolah; 2)sekolah lebih mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman bagi dirinya sehingga dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk memajukan sekolahnya; 3)sekolah lebih mengetahui kebutuhan lembaganya, khususnya input pendidikan yang akan dikembangkan dan didayagunakan dalam proses pendidikan sesuai dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan peserta didik; 4) pengambilan keputusan yang dilakukan oleh sekolah lebih cocok untuk memenuhi kebutuhan sekolah karena pihak sekolah yang paling mengetahui apa yang terbaik bagi sekolahnya; 5)penggunaan sumber daya pendidikan lebih efisien dan efektif bilamana dikontrol oleh masyarakat setempat; 6)keterlibatan semua warga sekolah dan masyarakat dalam pengambilan keputusan sekolah menciptakan transparansi dan demokrasi sehat; 7)sekolah dapat bertanggung jawab tentang mutu pendidikan masing-masing kepada pemerintah, orang tua peserta didik dan masyarakat pada umumnya sehingga akan berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan dan mencapai sasaran mutu pendidikan yang telah direncanakan; 8)sekolah dapat secara cepat merespon aspirasi masyarakat dan lingkungan yang berubah dengan cepat (Kajian Pelaksanaan MPMBS dan MBS, Departemen Pendidikan Nasional 2009).

4.2.3 Fakta dan Permasalahan Pengelolaan Sekolah

Dalam hal pengelolaan pendidikan, dijelaskan dalam Undang-Undang No.20 tahun 2003 pasal 50 bahwa “Pengelolaan sistem pendidikan nasional merupakan tanggung jawab pemerintah, dimana dalam hal ini pemerintah menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin

mutu pendidikan nasional. Pemerintah daerah provinsi melakukan atas penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan, dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan lintas daerah kabupaten/kota untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah. Sedangkan pemerintah kabupaten/kota mengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal.

Dijelaskan lebih lanjut bahwa yang dimaksudkan dengan standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala.

Standar nasional pendidikan ini digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan. Berkaitan dengan Standar Nasional Pendidikan, khusus dimaksud dengan standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Ditegaskan dalam PP Nomor 19 tahun 2005 pasal 49 bahwa “pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas”.

4.2.4 Implementasi MBS pasca pelaksanaan MPMBS

Sejak keluarnya UUSPN Nomor 20 tahun 2003, maka mulai tahun 2004 pemerintah (dalam hal ini Direktorat Pembinaan SMP dan pada saat itu disebut dengan Direktorat PLP) menetapkan sekolah-sekolah sebagai rintisan Sekolah Standar Nasional (SSN). Rintisan SSN ini pada dasarnya adalah untuk merintis sekolah memenuhi delapan standar nasional pendidikan.

Disamping melalui sekolah-sekolah yang dinyatakan sebagai rintisan SSN, Manajemen Berbasis Sekolah juga diharapkan dapat diimplementasikan kepada semua sekolah (SMP), baik sekolah potensial (Standar Pelayanan Minimal), sekolah yang tidak dirintis sebagai SSN maupun sekolah yang ditetapkan sebagai rintisan SBI atau RSBI.

Bentuk bimbingan teknis yang dilakukan pemerintah sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang terhadap Manajemen Berbasis Sekolah kepada sekolah-sekolah SSN ini antara lain melalui pelatihan dan pemberian dana bantuan SSN. Sebagian dana bantuan ini diharapkan dapat membantu sekolah untuk mengembangkan atau mengelola sekolah dengan prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Sekolah yaitu kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas.

Adapun hasil-hasil yang telah dicapai dalam implementasi Manajemen Berbasis Sekolah melalui program pemenuhan standar pengelolaan bagi sekolah pelaksana rintisan SSN dari tahun 2004 sampai dengan 2008 dapat diuraikan secara singkat di bawah ini.

- a) Rintisan SSN sebagai Sekolah Pelaksanan Manajemen Berbasis Sekolah
Sejak diterapkannya kebijakan SSN tahun 2004, maka sampai dengan tahun 2008 di provinsi DKI Jakarta telah terdapat 56 SSN, 20 RSBI, dan 8 SBI dari total 84 sekolah.
- b) Penilaian Kinerja Rintisan SSN sebagai Sekolah Pelaksanan Manajemen Berbasis Sekolah.
 - 1) Kinerja sekolah secara umum untuk tahun 2008 mengalami peningkatan yang signifikan dan cukup mengembirakan. Hal ini diindikasikan oleh naiknya rata-rata skor Kinerja Sekolah dari 336,00 (pada tahun 2007) menjadi 339,84 pada tahun 2008 untuk skor maksimal 400. Gejala ini menunjukkan meningkatnya “efektivitas kebijakan” Departemen Pendidikan Nasional cq. Direktorat Pembinaan SMP terhadap pengembangan sekolah, khususnya sekolah standar nasional. Di samping itu, dari sisi dispersi (persebaran skor) untuk tahun 2008 terjadi

peningkatan penyebaran skor. Fenomena ini menunjukkan tidak homogenya penerimaan kebijakan dari Direktorat Pembinaan SMP oleh sekolah-sekolah SSN. Dengan kata lain terjadi perbedaan penerimaan kebijakan Direktorat di tingkat sekolah (SSN) di seluruh Indonesia.

- 2) Khusus dalam standar pembiayaan, pada umumnya dari sisi pembiayaan, khususnya penggalangan dana dari masyarakat masih sangat rendah. Di lapangan timbul salah persepsi pemahaman Bantuan Operasional Sekolah (BOS), sebagian besar pejabat daerah memahami bahwa dengan adanya BOS maka sekolah gratis. Fenomena ini sangat mengganggu penerapan pola manajemen berbasis sekolah, khususnya dalam aspek penggalangan dana, baik dari unsur masyarakat (komite) maupun dari masyarakat pada umumnya. Di samping itu dilihat dari Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) yang ditetapkan sekolah, ada kecenderungan masih belum ada usaha yang kuat untuk menggali dana dari masyarakat. Dengan kata lain dana SSN menjadi sumber utama pengembangan sekolah, bahkan pihak Pemda cenderung “lepas tangan” dari subsidi pengembangan sekolah, apabila sekolah yang bersangkutan sudah mendapatkan grant SSN. Fenomena ini dapat sangat dimungkinkan karena pemahaman tentang pendanaan sekolah yang belum komprehensif (Kajian Pelaksanaan MPMBS dan MBS, Departemen Pendidikan Nasional 2009).

BAB 5

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bagian ini akan diuraikan tentang hasil penelitian bentuk dan derajat partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah. Juga dalam bagian ini akan berisi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian berdasarkan analisis terhadap kondisi partisipasi masyarakat yang didukung dengan data primer hasil wawancara dengan orang tua siswa, komite sekolah, perwakilan masyarakat dan LSM kemudian dikaitkan dengan teori yang digunakan melalui studi dokumen/kepuustakaan.

5.1 Hasil Penelitian

Sebagaimana telah dinyatakan dalam bab terdahulu, bahwasanya tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah yang difokuskan pada bentuk dan jenjang partisipasi masyarakat serta faktor-faktor yang menghambat partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah di Kecamatan Kalideres Kotamadya Jakarta Barat.

Wohlsletter dan Mohrman (1996) menjelaskan secara luas bahwa Manajemen Berbasis Sekolah adalah pendekatan politis untuk mendesain ulang organisasi sekolah dengan memberikan kewenangan dan kekuasaan kepada partisipan sekolah pada tingkat lokal guna memajukan sekolahnya. Partisipasi lokal yang dimaksudkan adalah partisipasi orang tua siswa dan masyarakat. Kubick (1988) mendefinisikan secara lebih sempit lagi mengenai Manajemen Berbasis Sekolah, yakni peletakan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan dari pemerintah kepada sekolah berkaitan dengan anggaran, personel dan kurikulum. Oleh karena itu Manajemen Berbasis Sekolah memberikan hak kontrol kepada kepala sekolah, guru dan orang tua.

Menurut Syarafuddin (2008) pengelolaan sekolah yang baik menekankan pada partisipasi seluruh elemen terkait dengan peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Elemen yang dimaksud bukan saja dalam bentuk partisipasi orang tua siswa, melainkan juga masyarakat umum, tokoh masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat.

Oleh karena itu pentingnya partisipasi masyarakat sebagai salah satu komponen keberhasilan pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2003 pasal 56 ayat 1 yang menyebutkan bahwa masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah. Peningkatan partisipasi masyarakat ditopang dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang Pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, yang tujuannya antara lain mewadahi partisipasi masyarakat dalam kerangka pembangunan pendidikan yang memenuhi kriteria efektivitas, efisiensi, relevansi dan peningkatan mutu.

Namun kenyataannya partisipasi masyarakat dalam pendidikan dasar dan menengah masih tetap relatif rendah. Hal tersebut didukung oleh pernyataan Bapak Darwin Nainggolan, Kepala Sekolah SMP Negeri 278, sebagai berikut :

“Partisipasinya rendah. Tidak terlalu signifikan dengan yang dulu. Setelah diteliti dari hasil, sepertinya lebih baik yang dulu. Rupanya lain lingkungan, lain motivasi. Contoh di Danau Toba, untuk penduduk sekitar yang umumnya petani. Akan tetapi dorongan dari orang tua besar. Kalau disini motivasinya berbeda, hanya berdasarkan bayaran sesaat. Sehingga adanya bantuan pemerintah malah mengurangi motivasi. Pendidikan dilakukan melalui sekolah, keluarga, dan masyarakat. Kita berusaha untuk meningkatkan pendidikan melalui sekolah dan keluarga karena kalau melalui masyarakat kita tidak bisa atur. Sehingga kita juga

melakukan pendekatan kepada keluarga”.(hasil wawancara pada tanggal 3 Desember 2009)

Menurut hasil wawancara yang dilakukan, orang tua dan komite sekolah telah diundang sekolah untuk menghadiri rapat yang membahas mengenai pengembangan standar isi yang meliputi pengembangan silabus kurikulum atau KTSP, hal tersebut dinyatakan oleh Bapak Arif Hidayat orang tua siswa dan Bapak Nisan Sarwo Edi, ketua Komite Sekolah SMP Negeri 278 Jakarta Barat:

“Kami terlibat dalam rapat koordinasi persiapan proses belajar yang diadakan oleh sekolah. Mengikuti rapat kerja juga yang membahas penyusunan KTSP” (hasil wawancara pada tanggal 3 Desember 2009).

“Komite sekolah bersama dengan orang tua siswa mengikuti rapat koordinasi pada awal bulan Juli lalu di sekolah dengan kesepakatan raker meliputi kalender pendidikan sekolah, jadwal pelajaran, dan jadwal kegiatan pengembangan proses belajar dan penilaian” .(hasil wawancara pada tanggal 3 Desember 2009).

Namun walaupun telah diundang, yang hadir dalam rapat tersebut sangatlah sedikit, orang tua yang hadir hanya mengikuti jalannya rapat tanpa memberikan masukan yang baik bagi pengembangan silabus KTSP khususnya dan kepada sekolah pada umumnya. Hal tersebut diperkuat oleh keterangan dari Bapak M. Toha dan Bapak Budi, orang tua siswa dari SMP Negeri 225 Jakarta Barat.

“Orang tua pernah diundang untuk hadir dalam rapat, tetapi kurang mengerti tentang kurikulum” (hasil wawancara pada tanggal 1 Desember 2009).

“Tidak pernah terlibat dalam pengembangan silabus/KTSP. Sekolah sudah mengundang tetapi tidak bisa hadir” (hasil wawancara pada tanggal 1 Desember 2009).

Mengenai tenaga pengajar atau guru, di SMP Negeri 225 harus memiliki skill yang tinggi. Sekolah telah memberikan pelatihan kepada para guru dengan melibatkan partisipasi komite sekolah, hal tersebut dinyatakan oleh Bapak T Adi Wijaya, Ketua Komite Sekolah SMP Negeri 225 Jakarta Barat :

“Peningkatan tenaga pendidik dan kependidikan yang mampu mengoperasionalkan komputer telah dilakukan kerja sama antara sekolah, komite sekolah dengan dinas pendidikan. Komite sekolah memberikan masukan mengenai penilaian guru yang berprestasi (penilaian secara berkala)” (hasil wawancara pada tanggal 1 Desember 2009).

Peningkatan partisipasi orang tua dalam penyelenggaraan sekolah merupakan suatu keharusan. Hal ini akan mampu menciptakan keterbukaan , kerjasama yang kuat antara sekolah dengan orang tua, dimana salah satu wujudnya berpartisipasi dalam proses pembelajaran anak, seperti yang diterangkan oleh Bapak M. Toha dan Bapak Budi, orang tua siswa SMP Negeri 225 Jakarta Barat.

“Bentuknya dengan memotivasi anak supaya semangat belajar, memonitor anak supaya mengerjakan PR” (hasil wawancara pada tanggal 1 Desember 2009).

“Mengawasi anak belajar dan memberikan dorongan supaya anak rajin belajar” (hasil wawancara pada tanggal 1 Desember 2009).

Sedangkan Komite Sekolah bersama Kepala sekolah terlibat langsung dalam meningkatkan proses pembelajaran yang efektif, seperti yang diutarakan oleh Bapak T Adi Wijaya, Ketua Komite Sekolah SMP Negeri 225 Jakarta Barat.

“Bersama sekolah mengembangkan proses pembelajaran yang efektif dan efisien untuk semua mata pelajaran, serta mengembangkan model-model dan inovasi dalam pembelajaran” (hasil wawancara pada tanggal 1 Desember 2009)

Dukungan dari masyarakat terhadap sekolah dalam hal standar sarana dan prasarana sebenarnya merupakan refleksi dari diciptakannya iklim keterbukaan di sekolah. Wujud partisipasi tersebut antara lain dengan membantu sekolah memperbaiki saluran air dan membantu dari segi keamanan sedangkan dari sisi finansial masyarakat hanya sedikit dan lebih banyak membantu dari segi tenaga, hal tersebut yang dikemukakan oleh Bapak M. Toha dan Bapak Budi, orang tua siswa SMP Negeri 225 Jakarta Barat,

“Dari segi pendanaan, kami tidak mampu untuk membantu dan pernah memberikan bantuan tetapi hanya sedikit. Dari sisi tenaga, kami pernah membantu sekolah memperbaiki saluran air dan membantu mengamankan material (bahan bangunan untuk rehab gedung sekolah)” (hasil wawancara pada tanggal 1 Desember 2009).

“Membantu sekolah memperbaiki saluran air dan juga mengawasi pembangunan rehabilitasi gedung” (hasil wawancara pada tanggal 1 Desember 2009).

Faktor keterbatasan ekonomi masyarakat Kecamatan Kalideres, yang rata-rata berpenghasilan sebagai buruh atau pekerja pabrik, menjadi salah satu penyebab kurangnya masyarakat dalam memberikan bantuan kepada sekolah dari segi finansial, seperti yang diutarakan Bapak Arif Hidayat dan Bapak Asnawi, orang tua siswa SMP Negeri 278 Jakarta Barat,

“Diminta memberikan sumbangan namun hampir tidak ada mau menyumbang karena kami hanya buruh pabrik yang penghasilannya sedikit” (hasil wawancara pada tanggal 3 Desember 2009)

“Kemampuan untuk menyumbang dalam bentuk dana terbatas” (hasil wawancara pada tanggal 3 Desember 2009).

Ketika kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah dilaksanakan, ternyata kesadaran masyarakat mulai tumbuh. Konsep bahwa pendidikan hanya tanggung jawab sekolah mulai ditinggalkan. Masyarakat mulai menyadari bahwa tanggung

jawab pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara sekolah dan masyarakat, hal tersebut tercermin dalam partisipasi masyarakat dalam pengembangan standar kompetensi kelulusan siswa yang diutarakan oleh Bapak M. Toha, orang tua siswa dan Bapak T Adi Wijaya, Ketua Komite Sekolah SMP Negeri 225 Jakarta Barat.

“Kami diundang sekolah dalam rapat pertemuan untuk membahas model pembelajaran yang aktif dan bagaimana caranya mengembangkan jam pelajaran untuk 4 mata pelajaran secara efektif” (hasil wawancara pada tanggal 1 Desember 2009).

“Komite sekolah bersama dengan orang tua secara bersama-sama memberikan masukan kepada sekolah untuk meningkatkan mutu lulusan dengan menetapkan standar kelulusan dan standar ketuntasan belajar setiap mata pelajaran. Melakukan koordinasi antara sekolah dengan orang tua dalam mengembangkan potensi belajar siswa dan membantu dalam mengembangkan pembelajaran model PAKEM” (hasil wawancara pada tanggal 1 Desember 2009).

Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan dan akuntabilitas. Orang tua sudah dilibatkan sekolah, namun mereka kurang memahami mengenai konsep Manajemen Berbasis Sekolah sehingga ketika diminta untuk memberi saran dan masukan, tidak maksimal. Hal tersebut dikemukakan oleh Bapak M. Toha dan Bapak Budi, orang tua siswa SMP Negeri 225 Jakarta Barat :

“Diikutsertakan oleh sekolah dalam penyusunan rencana pengembangan sekolah, diundang dalam rapat pertemuan yang membahas mengenai manajemen pengembangan sekolah” (hasil wawancara pada tanggal 1 Desember 2009).

“Pada saat terima rapor, saya diminta oleh sekolah untuk memberikan saran atau pendapat tetapi saya kurang mengetahui mengenai konsep

kelembagaan dan manajemen sekolah” (hasil wawancara pada tanggal 1 Desember 2009).

Peran masyarakat untuk menyokong biaya pendidikan sangat penting namun masyarakat ternyata tidak memiliki aset kekayaan memadai untuk ikut serta membiayai pendidikan. Hal ini salah satunya disebabkan faktor kemiskinan dan kesejahteraan hidup yang masih rendah di Kecamatan Kalideres. Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan Bapak M. Toha dan Bapak Budi, orang tua siswa SMP Negeri 225 Jakarta Barat :

“Pernah diajak sekolah untuk berpartisipasi dalam hal pendanaan, tetapi kami sebagai orang tua hanya bisa membantu sedikit” (hasil wawancara pada tanggal 1 Desember 2009)

“Orang tua kurang bisa membantu dalam segi pendanaan karena kami tidak mampu (keterbatasan ekonomi” (hasil wawancara pada tanggal 1 Desember 2009).

Selain itu, LSM dalam hal ini sebagai unsur masyarakat juga hanya membantu dari segi non finansial, yaitu memberi pertimbangan, masukan, saran kepada sekolah dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Suyadi, Ketua LSM :

“Kami selaku lembaga independen hanya bisa membantu dari segi non finansial, misalnya pada bulan agustus kemarin membuat kegiatan penyuluhan pendidikan reproduksi ke beberapa SMP di Jakarta Barat. Disamping itu kami juga terlibat dalam kepengurusan dewan pendidikan jakarta barat sebagai salah satu unsur dari masyarakat membantu untuk memberikan pertimbangan...” (hasil wawancara pada tanggal 12 Desember 2009)

5.2 Pembahasan

Kinerja pendidikan semakin banyak mendapatkan sorotan, khususnya dipandang dari segi mutu masukan, proses, luaran dan dampaknya. Meskipun demikian, masyarakat telah menerima esensi dan urgensi pendidikan melalui sekolah baik di sekolah potensial maupun di sekolah yang telah berstandar nasional (SSN), sebagai wahana proses kemanusiaan dan pemanusiaan. Orang tua dan masyarakat pengguna hasil pendidikan memahami bahwa partisipasi sekolah dalam proses pendidikan anak-anak mereka merupakan keniscayaan. Merupakan keniscayaan pula bagi orang tua dan masyarakat untuk berpartisipasi agar lembaga sekolah dapat beroperasi secara normal. Jika sekolah-sekolah makin otonom dan secara signifikan dapat menunjukkan kinerjanya, masyarakat akan percaya kepada warga sekolah sehingga partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah akan semakin intensif dan ekstensif.

Salah satu cara untuk mewujudkan kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah dengan jalan mengotimalkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah melakukan prakarsa pembentukan Komite Sekolah sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan (SK) Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) No. 044/U/2002 tanggal 2 April 2002. Tujuannya antara lain adalah mewadahi partisipasi masyarakat dalam kerangka pembangunan pendidikan yang memenuhi kriteria efektivitas, efisiensi, relevansi dan peningkatan mutu.

Kebutuhan dan harapan masyarakat akan mutu pendidikan yang baik tampaknya menjadi faktor pemacu utama inovasi manajemen pendidikan. Keputusan institusional yang dibuat oleh Kepala Sekolah dan staf untuk meningkatkan pelayanan internal (di dalam lembaga sekolah) dan eksternal (hubungan sekolah dengan masyarakat) akan sangat mempengaruhi proses pembuatan keputusan inovatif dalam bidang manajemen pendidikan (Jones, 1984).

Pada tataran penganggaran, disamping komitmen kuat pemerintah masyarakat pun harus makin kuat memberdayakan diri untuk membangun pendidikan. Bahwa pendidikan yang bermutu berbasis pada masyarakat, untuk masyarakat dan keluaran sekolah akan kembali kepada masyarakat. pemikiran tersebut tidak secara otomatis mengubah keadaan karena berkaitan dengan perubahan sikap mental yang sangat mungkin memerlukan waktu lebih dari sepuluh tahun sampai menemukan sosok yang permanen dan signifikan.

Dalam hal ini, model alternatif partisipasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pendidikan dasar dan menengah sangat diperlukan. Keberadaan komite sekolah dan dewan pendidikan perlu diberdayakan lagi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan.

Sebagai akibat dari perubahan dari konsep sentralisasi ke desentralisasi pendidikan adalah tuntutan kemandirian sekolah dan masyarakat dalam pengelolaan pendidikan. Peningkatan partisipasi masyarakat ditopang dengan adanya Komite Sekolah yang bertujuan untuk mewadahi dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional program pendidikan, meningkatkan tanggung jawab dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, serta menciptakan kondisi transparan, akuntabel dan demokratis dalam pendidikan.

Peran Komite sekolah hampir mencakup semua kegiatan yang bisa diperankan masyarakat dalam ikut berpartisipasi dalam pengelolaan pendidikan di sekolah. Peran itu meliputi : a) pemberi pertimbangan (*advisory agency*), b) pendukung (*supporting agency*), c) pengontrol (*controlling agencies*) dan d) mediator antara pemerintah dan masyarakat. Dalam hubungannya dengan pemberdayaan masyarakat, komite sekolah berfungsi mendorong komitmen masyarakat, melakukan kerjasama, menampung ide dan menggalang dana masyarakat.

Partisipasi masyarakat, khususnya orang tua siswa menjadi salah satu fondasi utama secara finansial bagi operasi sekolah, mengingat pendidikan melalui sekolah itu tidak gratis. Pemikiran ini tidak mereduksi peran pemerintah dari tahun ke tahun diharapkan dapat mengalokasikan anggaran untuk pendidikan pada kadar yang makin meningkat. Secara akademik, masyarakat akan melakukan fungsi kontrol sekaligus pengguna lulusan. Disinilah akuntabilitas sekolah akan teruji. Secara proses, masyarakat berhak mengkritisi kinerja sekolah agar lembaga milik publik ini tidak keluar dari tugas pokok dan fungsi utamanya. Masyarakat untuk menjadi fondasi sekaligus tiang penyangga utama pendidikan persekolahan yang berada pada radius tertentu tempat masyarakat itu bermukim (Danim, 2006).

Kemampuan sekolah dalam melibatkan orang tua dan masyarakat merupakan suatu bentuk akuntabilitas yang lebih besar yang dapat dilakukan oleh sekolah. Terlibatnya masyarakat yang lebih luas tidak berarti mengurangi kewenangan pemerintah pusat dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional untuk melakukan tugas kepengaturan dan pengawasan. Pengertian pengaturan dan pengawasan tidak dapat ditafsirkan sebagai garis komando, seperti ketika praktik sentralisasi dilakukan.

Kebijakan dasar Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama dalam pembangunan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) diarahkan kepada tiga masalah pokok, yakni: (1) perluasan akses pendidikan; (2) peningkatan mutu dan relevansi pendidikan; dan (3) peningkatan mutu manajemen pendidikan. Dua kebijakan yang disebut pertama (perluasan akses, serta peningkatan mutu dan relevansi pendidikan) bisa dipandang sebagai tugas substansial dari lembaga pendidikan, termasuk SMP, yang secara institusional memang diberi kepercayaan dan mandat oleh masyarakat untuk melayani kebutuhan pendidikan yang berkembang di dalam masyarakat. Sedangkan kebijakan dasar yang disebutkan terakhir (peningkatan mutu manajemen pendidikan) lebih bersifat instrumental untuk bisa mendukung tugas substansial yang disebutkan dalam kebijakan dasar yang pertama dan kedua.

Bagi Direktorat Pembinaan SMP, ketiga kebijakan dasar yang disebutkan di atas memberikan tantangan tersendiri, karena harus berpacu dengan tuntutan program Wajib Belajar (Wajar) 9 Tahun yang ditargetkan tuntas pada 2008/2009. Penuntasan Wajar 9 Tahun, sesuai kebijakan Direktorat Pembinaan SMP, bukanlah sekedar untuk mencapai angka partisipasi dalam pendidikan, melainkan sekaligus pula untuk mewujudkan pendidikan dasar yang bermutu dan relevan. Sebab, aspek perluasan akses serta aspek peningkatan mutu dan relevansi pendidikan sama-sama hendak dicapai melalui program Wajar 9 Tahun dimaksud.

Peranan pemerintah pusat, dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional sebagai pembuat kebijakan yang bersifat umum, sementara implementasi petunjuk teknis Manajemen Berbasis Sekolah diserahkan kepada masing-masing sekolah, hal tersebut seperti yang dinyatakan oleh Bapak Kir Haryana, Direktorat Pembinaan SMP:

“Konkritnya adalah pertama-tama membuat regulasi dalam kerangka pembinaan yaitu amanat UU Sistem Pendidikan, PP No.19, PP No. 48, PP 32. Kita harus membuat semacam regulasi namun lebih teknis, karena disebut panduan-panduan untuk pembinaan. Tetapi kalau regulasi semacam UU, PP, Permen namanya regulasi formal yang merupakan peranan pemerintah pusat. Sedangkan direktorat mengimplementasikan regulasi itu menjadi panduan-panduan pembinaan yang isinya bisa konsel atau penjabaran lebih operasional dari peraturan itu” (Hasil wawancara pada tanggal 10 Desember 2009).

Tantangan perluasan akses serta peningkatan mutu dan relevansi pendidikan tersebut menghajatkan kepedulian dan partisipasi masyarakat selaku pemberi mandat dan pemilik asli dari sekolah itu sendiri, apakah sekolah tersebut berstatus sekolah potensial atau sekolah berstandar nasional.

Yang dimaksud dengan sekolah potensial adalah sekolah yang masih relatif banyak kekurangan atau kelemahan untuk memenuhi kriteria sekolah yang

sesuai dengan standar nasional pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 pasal 35 maupun dalam PP No. 19 Tahun 2005 sedangkan sekolah standar nasional adalah sekolah yang sudah atau hampir memenuhi standar nasional pendidikan yaitu standar isi, standar proses, standar sarana dan prasarana, standar tenaga pendidik dan kependidikan, standar manajemen, standar kompetensi kelulusan, standar manajemen, standar pembiayaan dan standar penilaian.

Hal itu sejalan dengan rumusan visi Direktorat Pembinaan SMP yang mendambakan “Terwujudnya kesempatan dan pemerataan bagi semua warga negara Indonesia terhadap pelayanan pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang bermutu, akuntabel, efektif, efisien, dan mandiri dengan memberdayakan peran serta orangtua murid dan masyarakat dalam kerangka desentralisasi pendidikan” (Direktorat Pembinaan SMP).

Karena itu, untuk mewujudkan visi Direktorat Pembinaan SMP sangatlah penting menggalang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sekolah sehingga Program Wajar 9 Tahun yang bermutu, relevan, akuntabel, efektif, efisien, dan mandiri tersebut dapat menjadi suatu gerakan masyarakat secara nasional. Hal tersebut secara eksplisit dinyatakan sebagai salah satu strategi penting Direktorat Pembinaan SMP dalam upaya mewujudkan pemerataan pendidikan SMP yang bermutu.

Karenanya, bisa dimengerti bila upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan SMP juga mengemuka di tataran kebijakan peningkatan mutu manajemen pendidikan. Di sini, isu utamanya adalah pergeseran dari sentralisasi ke desentralisasi dan otonomisasi yang diwujudkan melalui pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah. Ia merupakan paradigma baru pengelolaan pendidikan yang bertujuan “mengembalikan” sekolah kepada pemilik atau *stakeholder* asli, yaitu masyarakat (Suryadi, 2003). Fungsi *stakeholder* (masyarakat) tersebut diwadahi dalam dua badan, yaitu Dewan Pendidikan di

tingkat kabupaten/kota, dan komite sekolah di tingkat satuan pendidikan atau sekolah (Kepmendiknas No.044/U/2003).

Berbagai usaha yang telah dilakukan untuk menggalang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan SMP, hingga sekarang belum sepenuhnya berkembang optimal sebagaimana diharapkan. Otonomisasi, demokratisasi, dan partisipasi yang sejatinya menjadi roh dari gerakan Manajemen Berbasis Sekolah belum benar-benar terlihat keberadaannya dan keefektifannya di dalam rangka meningkatkan akses, mutu, dan relevansi pendidikan di sekolah. Kehadiran Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan selaku wadah penggalang partisipasi masyarakat umumnya belum berfungsi optimal selaku badan pertimbangan, penyokong, pengendali, dan mediator.

Berikut pernyataan Bapak Kir Haryana, Direktorat Pembinaan SMP mengenai peranan pemerintah pusat dalam mendorong partisipasi masyarakat, yaitu:

“Pelibatan masyarakat umum, orang tua, dunia usaha terwadah dalam komite sekolah sesuai Kepmendiknas 48. Tapi dalam hal teknis, mereka harus secara internal membantu dirinya. Pemerintah hanya membuat regulasinya saja. Dorongan kepada mereka ketika kita workshop kita panggil juga komitenya. Ada blok grant untuk dewan pendidikan. Setiap sekolah dalam membuat RKS harus bersama komite dan ditandatangani komite”. (Hasil wawancara tanggal 10 Desember 2009).

Kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah merupakan salah satu bentuk desentralisasi pengelolaan pendidikan yang dipilih dengan tujuan untuk memandirikan sekolah dan meningkatkan mutu pendidikan. Kebijakan ini diimplementasikan dengan menerapkan pembelajaran aktif kreatif efektif dan menyenangkan, manajemen yang transparan dan dengan melibatkan peran serta masyarakat. Dalam implementasinya, kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah memerlukan kesiapan sumber daya manusia, sarana prasarana dan pembiayaan.

Peningkatan kualitas pendidikan sangat menekankan pentingnya peranan sekolah sebagai pelaku dasar utama yang otonom, dan peranan orang tua dan masyarakat dalam mengembangkan pendidikan. Sekolah perlu diberikan kepercayaan untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri sesuai dengan kondisi lingkungan dan kebutuhan pelanggan. Sekolah sebagai institusi otonom diberikan peluang untuk mengelola dalam proses koordinasi untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Konsep pemikiran tersebut telah mendorong munculnya pendekatan baru, yakni pengelolaan peningkatan mutu yang berbasis sekolah.

Otonomi daerah di bidang pendidikan secara tegas telah dinyatakan dalam PP Nomor 25 tahun 2000 yang mengatur pembagian kewenangan pemerintah pusat dan propinsi. Pemerintah pusat hanya menangani penetapan standar kompetensi siswa, pengaturan kurikulum nasional dan penilaian hasil belajar nasional, penetapan standar materi pelajaran pokok, pedoman pembiayaan pendidikan, persyaratan penerimaan, perpindahan dan sertifikasi siswa, kalender pendidikan dan jumlah jam belajar efektif.

Sebagai konsekuensi kebijakan ini, maka pelaksanaan konsep Manajemen Berbasis Sekolah atau pendidikan berbasis masyarakat merupakan suatu keharusan dalam penyelenggaraan pendidikan dalam era otonomi daerah. Manajemen Berbasis Sekolah sebagai konsep dasar manajemen pendidikan masa kini merupakan konsep manajemen sekolah yang memberikan kewenangan dan kepercayaan yang luas lagi, sekolah berdasarkan profesionalisme untuk menata organisasi sekolah. Mencari, mengembangkan, dan mendayagunakan sumber pendidikan yang tersedia, dan memperbaiki kinerja sekolah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan sekolah yang bersangkutan.

Konsep peningkatan mutu pendidikan berbasis sekolah muncul dalam kerangka pendekatan manajemen berbasis sekolah. Pada hakekatnya Manajemen Berbasis Sekolah akan membawa kemajuan dalam dua area yang saling tergantung, yaitu, *pertama*, kemajuan program pendidikan dan pelayanan kepada

siswa-orang tua, siswa dan masyarakat. *Kedua*, kualitas lingkungan kerja untuk semua anggota organisasi.

Model Manajemen Berbasis Sekolah menempatkan sekolah sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam menerapkan kebijakan, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang berdampak terhadap kinerja sekolah. Kinerja sekolah akan sangat ditentukan oleh kebijakan yang ditetapkan oleh sekolah yang menyangkut pengembangan kurikulum. Namun demikian, dalam merumuskan kebijakan, sekolah mengacu kepada kebijakan pusat dan memperhatikan aspirasi yang berkembang dari masyarakat melalui komite sekolah.

5.2.1 Bentuk dan Derajat Partisipasi Masyarakat Kecamatan Kalideres dalam Implementasi Kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah

Pada Subbab ini akan membagi pembahasan hasil penelitian menjadi tiga bagian yaitu bentuk partisipasi masyarakat Kecamatan Kalideres dari segi Standar Nasional Pendidikan, bentuk partisipasi masyarakat Kecamatan Kalideres dari segi hubungan dan wujudnya serta derajat partisipasi Kecamatan Kalideres, yang diuraikan sebagai berikut:

5.2.1.1 Bentuk Partisipasi Masyarakat Kecamatan Kalideres dari segi Standar Nasional Pendidikan (SNP)

Berdasarkan analisis data dari hasil wawancara dan data sekolah, maka untuk melihat partisipasi masyarakat dibagi dalam beberapa bagian mengacu kepada standar nasional pendidikan sebagaimana yang diamanatkan dalam PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang harus diterapkan oleh SMP Negeri 278 dan SMP Negeri 225 Jakarta Barat (selanjutnya disebut sekolah).

Partisipasi dalam Pengembangan Standar Isi

Untuk mewujudkan SSN berkaitan dengan standar isi kurikulum, sekolah melakukan pengembangan kurikulum yang dinamis dan inovatif. Sekolah menjalin kerjasama dengan Komite Sekolah, mengadakan studi banding atau kunjungan, lokakarya, dan workshop untuk menghasilkan Kurikulum Muatan Lokal yang sesuai dengan kondisi sekolah. Peningkatan pembekalan keterampilan siswa melalui pengembangan akademis maupun nonakademis yang didukung oleh semua komponen sekolah, orang tua maupun masyarakat.

Berikut pernyataan Bapak Kir Haryana, Direktorat Pembinaan SMP mengenai keterlibatan masyarakat dalam penyusunan standar isi (kurikulum), yaitu:

“Kurikulum itu jabaran dari standar isi, standar kompetensi lulusan, rencana pembelajaran, rencana evaluasi. Kurikulum itu sudah satu bentuk program. Meliputi bagaimana mulai dari visi, misi, SKL, silabus, panduan-panduan pembelajaran.

Masyarakat bisa membantu menyusun itu semua tapi melalui komite, kecuali perguruan tinggi. Misalnya sekolah dalam mengembangkan kurikulum sekolah. Sebelum itu dia mengundang perguruan tinggi untuk memberikan wawasan pengembangan substansi kompetensi. Karena pusat hanya mengatur standar isi”. (Hasil wawancara pada tanggal 10 Desember 2009).

Peningkatan administrasi kurikulum yang berstandar Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) atau Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) untuk semua mata pelajaran. Adapun strateginya adalah melakukan koordinasi dengan guru mata pelajaran, menyiapkan blanko/instrumen, studi banding, mengadakan workshop.

Pengembangan pemetaan pengelompokan materi pelajaran yang serumpun, dengan strategi mengadakan musyawarah guru mata pelajaran sekolah,

membentuk Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) sekolah, pelatihan, dan menjalin kerjasama dengan sekolah lain. Pengembangan analisis materi, silabus, RPP, dan evaluasi pembelajaran yang berstandar KTSP atau KBK, dengan strateginya adalah melakukan koordinasi Kepala Sekolah dan Komite Sekolah, menyiapkan instrumen/blanko yang dibutuhkan, menyusun jadwal kegiatan, mendatangkan nara sumber, workshop, melakukan kegiatan dalam menganalisis materi, menetapkan SK, menyusun silabus, dan mengevaluasi proses dan hasil pengembangan.

Pengembangan instrumen penilaian yang berstandar SNP, dengan strategi menyusun jadwal kegiatan, mendatangkan nara sumber, workshop, studi banding, menyusun dan melaksanakan perangkat penilaian, serta mengevaluasi proses/hasil kurikulum.

Partisipasi dalam Peningkatan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Peningkatan pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional, sekolah melakukan antara lain: Menjaln kerjasama dengan komite sekolah, studi banding, MGMP, pelatihan dan Workshop. Peningkatan tenaga pendidik dan kependidikan yang berkualifikasi, dengan strateginya adalah pendataan, melakukan koordinasi, mengikuti pelatihan/workshop, melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Guru harus mengikuti standar yang telah ditetapkan sesuai dengan PP No.19 Tahun 2005, seperti yang dikemukakan oleh Bapak Kir Haryana, Direktorat Pembinaan SMP, yaitu:

“Misalnya dalam pengembangan kurikulum, masyarakat tidak mempunyai kewenangan, tapi merupakan kewenangan guru sesuai dengan undang-undang. Guru dalam mengembangkan kurikulum harus memperhatikan prinsip relevansi, relevansi terhadap kebutuhan masyarakat” (Hasil wawancara pada tanggal 10 Desember 2009).

Peningkatan tenaga pendidik dan kependidikan yang mampu mengoperasikan komputer, dengan strateginya adalah melakukan koordinasi, menyusun perencanaan dan jadwal kegiatan, menyeleksi pelatih/tutor, melakukan pelatihan, menjalin kerjasama dengan komite sekolah, menyiapkan peralatan komputer.

Partisipasi dalam Peningkatan Standar Proses

Pengembangan proses pembelajaran yang efektif dan efisien untuk semua mata pelajaran, dengan strateginya adalah melakukan koordinasi, menyusun jadwal kegiatan, menyeleksi nara sumber, workshop, studi banding, pelatihan, menjalin kerjasama dengan komite sekolah.

Pengembangan model-model dan inovasi dalam pembelajaran untuk semua mata pelajaran, dengan strateginya adalah menyusun perencanaan dan jadwal, menyeleksi nara sumber, pelatihan/workshop dan studi banding.

Pengembangan sumber dan bahan pembelajaran yang inovatif, dengan strateginya adalah mengidentifikasi sumber dan bahan pembelajaran yang inovatif, merencanakan sumber dan bahan pembelajaran yang dibutuhkan, melaksanakan pengadaan sumber dan bahan pembelajaran, memanfaatkan dan mengevaluasi sumber dan bahan pembelajaran.

Hal diatas sesuai dengan pernyataan Bapak Adi T Wijaya, Ketua Komite Sekolah SMP Negeri 225 Jakarta Barat, yang menyatakan partisipasi masyarakat melalui Komite Sekolah dalam pengembangan standar proses pembelajaran, yaitu:

Bersama sekolah mengembangkan proses pembelajaran yang efektif dan efisien untuk semua mata pelajaran, serta mengembangkan model-model dan inovasi dalam pembelajaran” (Hasil wawancara pada tanggal 1 Desember 2009).

Partisipasi dalam Peningkatan Standar Sarana Prasarana Pendidikan

Peningkatan sarana pembelajaran yang memadai dan relevan dalam mendukung proses belajar mengajar, dengan strateginya pendataan kebutuhan media pembelajaran, klasifikasi prioritas kebutuhan media pembelajaran guru (buku pelajaran untuk siswa dan guru, *white board* dan *boardmarker*, komputer, alat-alat praktik IPA, alat bantu pembelajaran), kerjasama dengan Komite Sekolah.

Prasarana pendidikan yang memadai dan relevan dalam mendukung proses belajar mengajar, dengan strateginya adalah analisis kebutuhan fisik sekolah, menetapkan prioritas program fisik (rehab/pengembangan) gedung/bangunan, menjalin kerjasama dengan Komite Sekolah atau instansi terkait secara vertikal.

Partisipasi dalam Peningkatan Standar Kompetensi Kelulusan

Peningkatan mutu lulusan yang terus meningkat, dengan strategi adalah menetapkan standar kelulusan (SKL) dan standar ketuntasan belajar (SKB) setiap mata pelajaran, mengembangkan jam pelajaran untuk 4 mata pelajaran (Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan IPA), mengembangkan pembelajaran model PAKEM, melakukan koordinasi dengan orang tua, komite sekolah dalam mengembangkan potensi belajar siswa, membentuk dan mengaktifkan MGMP sekolah, melakukan *try out* untuk kelas 9.

Peningkatan prestasi akademik dalam lomba rata-rata 3 besar tingkat kabupaten, dengan strateginya adalah melakukan koordinasi, menyusun jenis dan jadwal kegiatan, membentuk kelompok belajar untuk pelajaran bahasa Inggris, bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS bagi siswa kelas VIII dan kelas IX yang berpotensi, membentuk dan menetapkan pembina/pendamping.

Peningkatan prestasi non akademik dalam lomba rata-rata 1 besar tingkat Kotamadya Jakarta Barat, dengan strateginya adalah melakukan koordinasi, menetapkan bidang ekstrakurikuler yang potensial, menetapkan target, mengadakan seleksi pembina dan pelatih yang potensial, menyusun jadwal kegiatan.

Partisipasi dalam Peningkatan Standar Mutu Kelembagaan dan Manajemen

Peningkatan manajemen sekolah yang akuntabel, transparan dan partisipatif, dengan strateginya adalah mengembangkan dan memantapkan konsep MBS terhadap warga sekolah, mengembangkan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan sesuai tupoksi, mengikuti kegiatan peningkatan mutu (pelatihan, seminar, kursus, studi lanjut) sesuai dengan kebutuhan, menertibkan pengelolaan administrasi sekolah (antara lain : ketenagaan, kurikulum, kesiswaan, sarana prasarana, keuangan, humas), mengembangkan pola monitoring dan evaluasi dalam pengembangan kelembagaan.

Peningkatan sekolah yang kondusif, dengan strateginya dalam menyusun program kegiatan yang melibatkan komponen sekolah dalam mewujudkan sekolah yang kondusif, menetapkan program prioritas, mengembangkan budaya disiplin, tertib dan santun oleh warga sekolah, menjalin sikap kooperatif dan kolaboratif antar warga sekolah dengan orang tua, sekolah dengan masyarakat sekitar, sekolah dengan komite sekolah.

Partisipasi dalam Pengembangan Standar Pembiayaan Pendidikan

Peningkatan pengembangan pembiayaan pendidikan yang memadai, wajar dan adil, secara transparan dan akuntabel, menjalin kerjasama dengan orang tua melalui Komite Sekolah. Namun dalam kenyataannya orang tua hampir tidak ada yang mendukung sekolah dari segi pendanaan.

Peningkatan kerjasama dengan penyandang dana (sponsor, alumni dan lain-lain) dalam meningkatkan pengembangan pembiayaan pendidikan, dengan strateginya adalah menjalin kerjasama dengan pihak swasta, mencari informasi dan pendataan keberadaan alumni, membentuk wadah alumni, mengaktifkan organisasi alumni.

Pengembangan usaha-usaha sekolah melalui unit produksi (Kopsis), dengan strateginya adalah memperkenalkan/ mensosialisasikan keberadaan koperasi sekolah, tersusunnya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga KOPSIS, menyiapkan macam kebutuhan yang diperlukan warga sekolah, penjadwalan tenaga KOPSIS, pelatihan tenaga KOPSIS.

Partisipasi dalam Pengembangan Standar Penilaian

Pengembangan sistem penilaian beragam untuk semua mata pelajaran dan semua jenjang kelas, dengan melakukan identifikasi kemampuan guru dalam melakukan penilaian, melakukan analisis kecenderungan guru dalam melakukan penilaian, membentuk kelompok guru sesuai dengan kelompok bidang studi dalam penilaian, melakukan workshop/pelatihan, melakukan evaluasi proses dan hasil penilaian dalam pembelajaran, dan menindaklanjuti hasil kegiatan penilaian.

Peningkatan sistem penilaian oleh guru, dan sekolah dalam pembelajaran atau akhir kegiatan pembelajaran, dengan strateginya adalah melakukan koordinasi (guru, kurikulum, orang tua) dalam menetapkan kriteria penilaian, menetapkan aspek-aspek penilaian untuk semua mata pelajaran, menetapkan aspek-aspek pendukung dalam penilaian, mengadakan koordinasi dengan tim MGMPS untuk menentukan standar penilaian, dan mengembangkan model-model penilaian sesuai dengan kemahiran guru.

5.2.1.2 Bentuk Partisipasi Masyarakat Kecamatan Kalideres dari Segi Hubungan dan Wujudnya

Berdasarkan analisis program sekolah yang dikaitkan dengan delapan standar nasional pendidikan, maka bentuk partisipasi masyarakat dilihat dari hubungan dan wujudnya sebagai berikut:

Dengan orang tua siswa. Hubungan baik antara sekolah dengan orang tua siswa tersebut dibina sejak awal siswa masuk sekolah. Sekolah dan orang tua saling memberikan informasi tentang perkembangan anaknya baik di sekolah maupun di keluarga, yang berkaitan tentang kemajuan, permasalahan maupun alternatif jalan penyelesaiannya.

Hubungan dengan orang tua/wali siswa ini dilaksanakan melalui berbagai cara atau teknik antara lain:

- Rapat pertemuan
Yang dapat dilaksanakan setiap awal tahun, akhir semester, dan akhir tahun untuk membicarakan program-program sekolah, perkembangan anak, hasil-hasil yang dicapai, permasalahan yang ada, dan sebagainya. Dari sejumlah rapat pertemuan yang dilaksanakan oleh sekolah, orang tua siswa telah diundang dan dilibatkan, namun rapat hanya dihadiri oleh sebagian kecil orang tua siswa dan perwakilan masyarakat, sehingga dalam pengambilan keputusan akhir mengenai suatu program sekolah, Kepala Sekolah memegang peranan yang besar.
- Pameran dan pekan seni
Sekali waktu dalam memperingati hari-hari besar, misalnya menyambut hari ulang tahun kemerdekaan atau pada akhir tahun ajaran, mengundang orang tua/wali siswa untuk melihat pameran hasil karya siswa dan kesenian yang ditampilkan oleh siswa.

- Undangan khusus

Bagi orang tua/wali siswa yang anaknya mempunyai penurunan prestasi, banyak absen, berperilaku kurang baik, putus sekolah, atau permasalahan lainnya dipanggil atau diundang ke sekolah secara khusus untuk bertukar pikiran dalam mencari penyebab dan alternatif pemecahannya.

- Kunjungan ke rumah

Untuk mempererat hubungan sekolah dengan orang tua, pihak sekolah yaitu kepala sekolah atau guru mengadakan kunjungan ke rumah orang tua.

Kunjungan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh gambaran tentang latar belakang anak dalam kehidupan keluarga, seperti kebiasaan sehari-hari, dan masalah yang dihadapi anak di lingkungan keluarga, termasuk juga untuk peningkatan layanan pendidikan dan motivasi belajar. Bahkan beberapa kasus di sekolah, guru menjemput siswa untuk mengikuti Ujian Nasional, karena tidak hadir tanpa alasan yang jelas.

Dalam memenuhi kebutuhan program kegiatan sekolah, sekolah menerima bantuan orang tua. Bantuan yang diberikan berbentuk bantuan moril seperti saran pemikiran, dukungan terhadap kebijakan, atau menerima kunjungan guru ke rumah, menghadiri rapat sedangkan bantuan dalam bentuk material seperti uang, buku-buku, meja kursi siswa, bahan bangunan, tenaga kerja sangat kurang atau minim.

Dengan perwakilan masyarakat. Sekolah merupakan bagian dari lingkungan masyarakat sekitarnya. Oleh karena itu hubungan sekolah dengan masyarakat sekitarnya memberikan kontribusi dalam melaksanakan pendidikan, penjangkaran anak usia sekolah, dan memotivasi anak.

Hubungan sekolah dengan masyarakat selain menggunakan cara atau teknik seperti hubungan dengan orang tua sebagaimana dipaparkan di atas, sekolah juga berhubungan dengan tokoh masyarakat, dan perangkat kecamatan, sehingga semua pihak membantu sekolah dalam menjaring anak usia sekolah,

drop out, serta mensukseskan program wajib belajar dan meningkatkan mutu pendidikan.

Dengan demikian bentuk partisipasi dari masyarakat antara lain: a) Pengawasan terhadap anak-anak; b) Tenaga, yaitu sebagai sumber atau tenaga sukarela untuk membantu mensukseskan wajib belajar dan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, serta memperbaiki sarana prasarana baik secara individu maupun secara gotong-royong; b) Pemikiran, namun masyarakat kurang dalam memberikan masukan berupa pendapat, pemikiran dalam membantu program sekolah dan memotivasi anak dalam belajar; dan c) Pendanaan, masyarakat kurang aktif dalam pendanaan, hal tersebut disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam menyumbang, dan kondisi ekonomi masyarakat sekitar kurang mampu.

Hubungan dengan LSM. LSM merupakan lembaga non pemerintah yang lebih dikenal dengan NGO (Non Government Organization). LSM ini merupakan lembaga masyarakat yang tidak mencari keuntungan atau laba. LSM sebagai fasilitator antara sekolah dengan pihak luar (dalam hal ini dinas pendidikan dan dunia usaha), membantu memberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan dan pendukung baik yang berwujud pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan, seperti yang dinyatakan oleh Bapak Drs. Suyadi, Ketua LSM yang bergerak di bidang pendidikan, yaitu:

“Kami selaku lembaga independen hanya bisa membantu dari segi non finansial, misalnya pada bulan agustus kemarin membuat kegiatan penyuluhan pendidikan reproduksi ke beberapa SMP di Jakarta Barat. Disamping itu kami juga terlibat dalam kepengurusan dewan pendidikan jakarta barat sebagai salah satu unsur dari masyarakat membantu untuk memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan (Advisory). Disamping itu juga sebagai pendukung baik yang berwujud pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan (Supporting).Pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas

penyelenggaraan dan keluaran pendidikan (Controlling). Mediator antara pemerintah (eksekutif) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (legislatif) dengan masyarakat (Mediator, ”)(Hasil wawancara tanggal 12 Desember 2009).

Hubungan dengan Komite Sekolah. Komite sekolah memiliki peranan yang besar dalam memberikan pertimbangan (*advisory agencies*), mendukung (*supporting agencies*) dalam penyelenggaraan kegiatan sekolah, mengontrol (*controlling*) dalam transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan sekolah, dan mediator antara sekolah, Kecamatan (pihak pemerintah) dengan orang tua. Hubungan tersebut berupa yang berwujud penyadaran masyarakat melalui sosialisasi program sekolah, pemikiran dan tenaga konsultasi dan penyediaan data, hal tersebut seperti yang dinyatakan oleh Bapak Drs. Rahmat Hidayat Kepala Sekolah SMP Negeri 225 Jakarta Barat yaitu:

“Peran komite sekolah. Komite sekolah terlibat dalam kegiatan sekolah, misalnya dalam penyusunan program, anggaran, menyampaikan informasi ke masyarakat. Menjalankan fungsinya melakukan kontrol, sebagai media ke masyarakat.

Setiap tahun ada musyawarah orang tua/wali murid yang diselenggarakan komite” (Hasil wawancara tanggal 1 Desember 2009).

5.2.1.3 Derajat Partisipasi Masyarakat Kecamatan Kalideres

Berdasarkan hasil temuan penelitian mengenai karakteristik partisipasi orang tua siswa, Komite Sekolah, perwakilan masyarakat dan LSM yang telah diuraikan diatas, apabila dikaitkan dengan konsep delapan tangga partisipasi masyarakat yang dikemukakan oleh Arnstein (Bab II hal. 20-23) memenuhi karakteristik derajat partisipasi masyarakat (*Degree of Tokenism*) yaitu partisipasi masyarakat telah didengar dan berpendapat tetapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan jaminan bahwa pandangan mereka akan dipertimbangkan oleh sekolah, dalam taraf ini partisipasi masyarakat memiliki

kemungkinan yang sangat kecil untuk menghasilkan perubahan dalam masyarakat. Derajat pada tangga ke lima atau Placation, yaitu suatu kondisi (penentruman) berarti bahwa komunikasi telah berjalan baik dan sudah ada negosiasi antara masyarakat dengan sekolah, masyarakat (khususnya masyarakat dengan tingkat ekonomi lemah) dimungkinkan untuk memberikan masukan secara lebih signifikan dalam penentuan hasil kebijakan, namun proses pengambilan keputusan masih dipegang oleh sekolah. Karena masyarakat belum secara aktif terlibat dalam rapat pertemuan yang diadakan sekolah, sumbangan pikiran, dan saran dari masyarakat belum diterima secara optimal oleh sekolah, sehingga pada akhirnya sekolah berperan dalam proses pengambilan keputusan.

Perasaan memiliki terhadap sekolah (*sense belonging*) kurang, pihak sekolah telah sering mengadakan rapat pertemuan orang tua, tetapi yang hadir hanya sebagian jumlah orang tua siswa, dan yang benar-benar memberikan ide atau pendapatnya hanya sedikit, kebanyakan dari orang tua hanya mengikuti dan mendengar saja. Masyarakat lebih tertarik untuk berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan yang diselenggarakan oleh sekolah, daripada kegiatan program sekolah.

Partisipasi masyarakat Kecamatan Kalideres dari segi pendanaan terhadap sekolah juga sangat kurang, hal tersebut sangat dirasakan oleh SMP Negeri 278 dan SMP Negeri 225. Selama satu tahun terakhir ini sejak adanya program sekolah gratis dan setelah digulirkannya Biaya Operasional Sekolah (BOS) dan Biaya Operasional Pendidikan (BOP), sekolah hampir tidak pernah menerima bantuan berupa materi. Masyarakat masih mempunyai image bahwa dengan adanya BOS dan BOP sekolah atau pendidikan menjadi gratis. Hal ini tercermin pada angka partisipasi masyarakat yang belum memadai dengan kontribusi RAPBS dari komite belum terhimpun.

5.2.2 Faktor-faktor yang Menghambat Partisipasi Masyarakat dalam Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah di Kecamatan Kalideres

Adapun kondisi masyarakat sekitar sekolah merupakan masyarakat yang religius dan heterogen dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah dengan mata pencaharian rata-rata sebagai buruh pabrik, oleh karena itu sekolah menjalin kerjasama dengan orang tua siswa, komite sekolah, perwakilan masyarakat, dan Kecamatan. Kerja sama ini diharapkan dapat memberikan dukungan yang kuat dan menguntungkan bagi sekolah dalam hal pengembangan sekolah, peningkatan prestasi akademik dan non akademik.

Partisipasi masyarakat dalam pendidikan tidak muncul begitu saja tanpa adanya upaya dari sekolah untuk menggalangnya. Upaya untuk menggalang dan mendorong partisipasi masyarakat telah dilakukan agar masyarakat tergerak dalam meningkatkan mutu pendidikan. Perlakuan sekolah selama ini terhadap masyarakat dinilai sebagai pelengkap saja. Hal yang demikian membentuk opini masyarakat bahwa sekolah merupakan tanggung jawab pemerintah.

Oleh karena itu peranan Kepala Sekolah sangat penting untuk proaktif menggalang dan memberikan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat, bahwa masyarakat ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan pendidikan di Kecamatan Kalideres.

Dari hasil wawancara dengan Kepala Sekolah tampak jelas bahwa partisipasi masyarakat kurang. Sebab, yang diutamakan hanyalah iuran sekolah. Menurut pemikiran Kepala Sekolah, yang namanya partisipasi adalah pemberian iuran sekolah setiap bulan sebagaimana sudah ditentukan. Bahkan, besarnya iuran tergantung kepada kesepakatan Kepala Sekolah dengan beberapa pengurus komite sekolah. Namun setelah adanya kebijakan Sekolah Gratis dengan digulirkannya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP), sekolah sudah tidak diperbolehkan untuk memungut kepada orang tua siswa, tetapi dimungkinkan bagi masyarakat untuk memberikan sumbangan secara sukarela kepada sekolah.

Keterlibatan masyarakat di Kecamatan Kalideres ; dalam hal ini orang tua siswa komite sekolah, dan perwakilan masyarakat (ketua RW) terhadap kemajuan pendidikan di sekolah sangat terbatas. Kenyataan ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

Pertama, pihak sekolah kurang memberikan motivasi dan kesempatan kepada orang tua siswa, pengurus komite sekolah, dan tokoh masyarakat untuk berperan aktif dalam memajukan sekolah. Mereka hanya diberi peran yang sangat terbatas sehingga keterlibatan mereka juga terbatas. Ini bisa disebabkan oleh karena kurang terbukanya Kepala Sekolah kepada masyarakat atau kurangnya inisiatif dari Kepala Sekolah dalam menjelaskan program sekolah.

Kedua, pihak masyarakat menganggap bahwa tugas dan tanggung jawab pendidikan ada di pundak pemerintah; dalam hal ini, guru, kepala sekolah, dan pejabat yang berkompeten di bidang pendidikan. Akibatnya, masyarakat tidak merasa memiliki tanggung jawab untuk memajukan sekolah. Kalaupun mereka mau menyumbang maka itu hanya sebatas sumbangan tanpa adanya niat yang lebih mendalam untuk memajukan sekolah.

Dari gambaran tersebut tampak jelas bahwa kurangnya partisipasi masyarakat bukan semata-mata karena kelemahan salah satu komponen, misalnya karena orang tua atau masyarakat tidak sadar akan pendidikan, atau sekolah kurang pro aktif dalam menggali potensi, melainkan bisa bersumber dari keduanya.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa pengelolaan sekolah dengan menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah dalam kerangka pemenuhan SNP, yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Namun demikian, banyak hal yang menghambat partisipasi masyarakat dalam implemementasi Manajemen Berbasis Sekolah di Kecamatan Kalideres. Beberapa diantaranya diuraikan di bawah ini.

5.2.2.1 Faktor Sosial dan Ekonomi

Melihat kondisi Kecamatan Kalideres yang merupakan salah satu basis industri di Kotamadya Jakarta Barat, namun dari segi sosial dan ekonomi, masyarakat di Kecamatan Kalideres merupakan masyarakat yang termasuk dalam kategori menengah kebawah dengan mata pencaharian rata-rata sebagai buruh pabrik dan sebagai wirastawan usaha menengah dan kecil. Tingkat pendidikan masyarakat terutama orang tua siswa rata-rata lulusan SMA.

Berikut pernyataan dari H. Dani, Ketua RT 06 Kecamatan Kalideres, mengenai kondisi sosial masyarakat Kalideres:

“Dari segi lingkungan, banyak pabrik-pabrik. Penduduk berorientasi untuk bekerja karena kondisi sekitarnya adalah pekerja” (Hasil wawancara tanggal 8 Desember 2009).

Pernyataan diatas dipertegas oleh Bapak Arif Hidayat, orang tua siswa SMP Negeri 225 Jakarta Barat:

“Keterbatasan ekonomi dari orang tua siswa. Kami rata-rata hanya bekerja sebagai buruh pabrik dan wiraswasta usaha kecil” (Hasil wawancara tanggal 8 Desember 2009)

Informan utama yaitu orang tua siswa SMP Negeri 278 yang diwawancarai peneliti bekerja sebagai buruh pabrik, dengan tingkat pendidikan SMA.

5.2.2.2 Faktor Opini Masyarakat

Dalam hal biaya pendidikan, ditengah-tengah masyarakat telah terbentuk opini bahwa kebijakan pendidikan gratis melalui BOS dianggap dan telah

dipersepsikan gratis untuk semuanya, bebas dari tanggung jawab biaya pendidikan, dan merasa bahwa seluruh biaya pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah. Hal ini tercermin pada angka partisipasi masyarakat yang belum ada ditandai dengan kontribusi RAPBS dari komite belum terhimpun.

Masyarakat menganggap bahwa dengan adanya kebijakan sekolah gratis dengan digulirkannya dana BOS, maka masyarakat tidak perlu lagi berpartisipasi dalam membantu sekolah dari segi pembiayaan. Padahal sekolah masih sangat memerlukan partisipasi masyarakat, sebagai contoh untuk kegiatan ekstrakurikuler, sekolah tetap memerlukan biaya tambahan untuk pengadaan alat-alat olahraga, material kerajinan tangan.

Bapak Drs. Rahmat Hidayat, Kepala Sekolah SMP Negeri 225 Jakarta Barat menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pendanaan kurang, yaitu:

“Orang tua kita himbau untuk menyumbang, namun kenyataannya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kalau di sini kurang karena menengah ke bawah. Namun secara umum, prestasi naik, sehingga dipilih SSN di Kalideres. Dari segi saran, ide, non-materi.

Ada. Misalnya dalam menentukan waktu belajar. Ataupun dalam pengembangan sarana sekolah seperti penyediaan ac, orang tua memberi solusi untuk mencari” (Hasil wawancara pada tanggal 1 Desember 2009).

Dampak yang sangat dirasakan adalah terjadinya penurunan kinerja sekolah dan mutu pendidikan yang diharapkan sulit tercapai. Dalam kondisi yang demikian itu, maka implementasi Manajemen Berbasis Sekolah akan mengalami hambatan, khususnya dalam hal penggalangan partisipasi/kerjasama dengan masyarakat/pemerintah daerah yang mampu secara ekonomi.

5.2.2.3 Pemahaman masyarakat yang kurang terhadap Manajemen Berbasis Sekolah

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa Manajemen Berbasis Sekolah adalah model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah, memberikan fleksibilitas/keluwes-an-keluwes-an kepada sekolah, dan mendorong partisipasi secara langsung orang tua, Komite Sekolah, perwakilan masyarakat, dan LSM untuk meningkatkan mutu sekolah. Manajemen Berbasis Sekolah menganut prinsip keterbukaan, bertanggung jawab, kemandirian, partisipatif, dan kerjasama dengan semua pihak.

Hal tersebut ditegaskan oleh H. Dani, Ketua RT 06 Kecamatan Kalideres, sebagai berikut:

“Hanya terbatas pada kegiatan ambil rapot namun hanya terbatas pada kehadiran dan tidak memberikan pendapat dalam rapat. Ini terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kegiatan sekolah.” (Hasil wawancara tanggal 8 Desember 2009)

Sikap masyarakat yang menyerahkan urusan pendidikan semata kepada sekolah dan guru dipandang merupakan solusi yang jitu untuk menyiasati kesibukan orang tua yang harus lebih banyak menghabiskan waktu untuk bekerja di luar rumah. Orang tua kurang terlibat dalam pertemuan yang diadakan sekolah, jikapun hadir, tetapi tidak memberikan pemikiran dan saran yang membangun kepada sekolah. Hal tersebut karena masyarakat kurang paham terhadap kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah yang diterapkan di sekolah.

5.2.3 Upaya-upaya untuk Mengatasi Hambatan dalam Partisipasi Masyarakat

Berdasarkan hasil analisis data lapangan, ada beberapa usaha yang telah dilakukan sekolah untuk mengatasi hambatan dalam partisipasi, antara lain:

Pertama, mengundang orang tua siswa, komite sekolah, dan ketua RW dalam sebuah diskusi tentang bagaimana cara meningkatkan program sekolah. Sekolah menyajikan keadaan dan capaian sekolah selama ini, visi dan misi sekolah serta keadaan yang diverbalkan bagi anak di masa depan.

Kedua, Sekolah menjelaskan kepada masyarakat bahwa tanggung jawab pendidikan bukan hanya pada pemerintah, melainkan juga masyarakat. Dengan pemahaman yang benar tentang konsep ini, maka perlahan-lahan masyarakat akan mengubah sikapnya. Mereka akan semakin merasa bertanggung jawab terhadap pendidikan di sekolah.

Ketiga, Sekolah memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk turut mengelola keuangan sekolah melalui keterlibatan masyarakat dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran sekolah, terutama yang bersumber dari masyarakat.

Bentuk partisipasi masyarakat yang diharapkan dalam pendidikan dasar dan menengah yang dikemukakan pada alternatif model yang ditawarkan adalah adanya keterlibatan yang saling menguntungkan. Partisipasi harus berjalan dari dua arah tanpa ditentukan siapa yang harus memula karena partisipasi masyarakat akan meningkat jika melihat satu sekolah berprestasi dengan baik, dan sekolah akan berprestasi lebih baik jika ditunjang oleh partisipasi masyarakat yang memadai.

Temuan di lapangan menunjukkan pula bahwa, kemitraan bersinergi akan dapat dibangun dengan baik. Bentuk partisipasi melalui interaksi sekolah dan masyarakat akan bisa dilihat dari tiga indikator utama, yaitu hubungan yang kooperatif, intensif, dan komunikatif. Kooperatif mengandung makna bahwa program sekolah harus melibatkan masyarakat, dan masyarakat dengan ikhlas pula mensupport program sekolah. Intensif dimaknai bahwa hubungan sekolah dan masyarakat bukan bersifat insidental/sementara atau pada waktu tertentu saja, tetapi terbina secara berkesinambungan. Sedangkan, komunikatif artinya setiap program tersosialisasi dengan baik kepada semua unsur masyarakat. Bentuk hubungan yang komunikatif ini akan menghilangkan ketimpangan (seperti temuan

penelitian) antara apa yang dirasakan oleh sekolah dan apa yang terjadi di masyarakat. Sekolah menganggap telah memberi kesempatan, telah mensosialisasikan semua programnya ke masyarakat, tetapi masyarakat masih menyatakan belum dilibatkan.

Ada lima prasyarat yang harus dimiliki agar partisipasi masyarakat dapat terbina dengan baik. Pertama, sekolah dan masyarakat harus berani melakukan elaborasi tidak saling menunggu. Apa yang dipandang perlu oleh sekolah dikomunikasikan ke masyarakat dan sebaliknya. Kedua, program yang telah diluncurkan harus siap dimodifikasi, baik oleh unsur sekolah maupun oleh unsur masyarakat. Ketiga, kesiapan kedua belah pihak untuk melakukan modifikasi ke arah yang lebih baik akan mempermudah penerimaan masyarakat. Keempat, penerimaan masyarakat dalam pola hubungan yang lebih baik sangat ditentukan pula oleh saling percaya yang tinggi, tidak saling mencurigai. Kelima, saling percaya yang terbina dengan baik akan menjadikan pola hubungan yang informatif dan mendukung peningkatan partisipasi semua unsur masyarakat terhadap pendidikan.

Bentuk partisipasi masyarakat dalam model kemitraan bersinergi harus ditopang dengan tiga indikator utama, kolektif, kesetaraan, dan transparansi. Bentuk partisipasi bermakna bahwa semua organisasi masyarakat ikut berpartisipasi dalam program sekolah. Organisasi pemerintah, komite sekolah, LSM, dan organisasi lainnya di masyarakat merupakan satu kesatuan yang tidak jalan sendiri-sendiri. Sifat kolektivitas akan terbangun jika semua organisasi mempunyai kesetaraan baik dari segi kedudukan, peran, dan fungsinya. Bentuk partisipasi yang setara akan terwujud jika ada transparansi (keterbukaan) dari semua pihak. Sering rusaknya bentuk hubungan organisasi baik dari segi kolektivitas dan kesetaraan karena transparansi yang tidak tercipta pada setiap level organisasi.

Kepemimpinan yang demokratis akan memberikan kesempatan kepada semua unsur masyarakat untuk berpartisipasi dalam pola organisasi yang ada

secara sukarela, dan hal tersebut memudahkan pertanggungjawaban publik (akuntabilitas) karena semua kegiatan berjalan sinergi dalam pola organisasi tanpa ada yang ditutup-tutupi. Dengan terciptanya akuntabilitas yang baik maka pencitraan sekolah yang positif dalam pandangan semua unsur masyarakat yang akan mendorong mereka berpartisipasi lebih baik.

Bentuk hubungan kerja juga merupakan salah satu faktor penentu dalam model kemitraan bersinergi. Bentuk hubungan yang komunikatif dengan pola organisasi yang baik, tidak akan berjalan mulus jika pola kerja tidak tertata dengan baik.

Pola kerja mutualis bahwa kerjasama antara sekolah masyarakat harus saling menguntungkan. Sekolah akan merasakan partisipasi masyarakat bermanfaat bagi peningkatan mutu sekolah, dan masyarakat merasakan manfaat dari apa yang dihasilkan sekolah. Selanjutnya, inisiatif-kreatif sangat diperlukan untuk munculnya ide-ide baru yang mendorong peningkatan kinerja sekolah. Dengan adanya inisiatif yang kreatif sekolah akan terpacu terus mengikuti perkembangan yang berubah dengan cepat. Hal ini akan lebih optimal dengan semangat inovasi yang original, pembaharuan yang murni hasil kerja sama sekolah dan masyarakat. Pola kerja yang bersifat mutualis penuh inisiatif yang kreatif dengan semangat inovasi yang mandiri memerlukan prasyarat yakni wawasan yang luas, kedewasaan, kejujuran, dan percaya diri.

Wawasan yang luas sangat diperlukan munculnya bentuk hubungan kerja yang ideal. Makin luas wawasan pelaksana sekolah dan setiap unsur di masyarakat akan memudahkan munculnya ide-ide kreatif untuk diterapkan sebagai inovasi – original di sekolah. Wawasan yang luas harus ditunjang dengan kedewasaan melihat segala sesuatunya dari berbagai aspek dengan pertimbangan yang matang penuh perhitungan, dan kuncinya adalah kejujuran dalam melaksanakan setiap kegiatan yang telah ditetapkan. Terciptanya pola kerja yang ditunjang dengan wawasan yang luas, kedewasaan, dan kejujuran akan menumbuhkan rasa percaya diri yang tinggi bagi sekolah dan setiap unsur

masyarakat dalam mewujudkan tujuan yang ingin dicapai pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Berikut ini akan dipaparkan kembali operasional konsep beserta judgementnya, sebagai berikut:

Tabel 17
Hasil Operasionalisasi Konsep Partisipasi Masyarakat dalam Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah

No.	Faktor-faktor yang diamati	Jenis Data	Teknik Pengambilan Data	Sumber Data		Ukuran	Judgement
				Informan	Dokumen		
	Partisipasi Masyarakat dalam Manajemen Berbasis Sekolah					Bentuk dan Derajat partisipasi masyarakat dianalisis berdasarkan teori <i>Ladder of Citizen Participation</i> (Sherry R. Arnstein)	
1	<p>Bentuk partisipasi masyarakat</p> <p>Indikator bentuk partisipasi adalah:</p> <p>1. Keikutsertaan masyarakat dalam program Manajemen Berbasis Sekolah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Partisipasi masyarakat dalam peningkatan Standar Isi - Partisipasi masyarakat dalam peningkatan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan - Partisipasi masyarakat dalam peningkatan Standar Proses - Partisipasi masyarakat 	Primer dan Sekunder	Wawancara mendalam dan studi dokumen	Orang tua siswa, Komite Sekolah, dan Kepala Sekolah SMP Negeri 278 dan SMP Negeri 225 Jakarta Barat	Profil Sekolah, PP No.19 Tahun 2005	Melalui penyusunan program sekolah yang dituangkan dalam Rencana Pengembangan Sekolah	Menurut hasil wawancara dengan informan setiap sekolah harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan sesuai PP No.19 Tahun 2005 yang terdiri dari 8 standar

No.	Faktor-faktor yang diamati	Jenis Data	Teknik Pengambilan Data	Sumber Data		Ukuran	Judgement
				Informan	Dokumen		
	<p>dalam peningkatan Standar Sarana Prasarana Pendidikan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Partisipasi masyarakat dalam peningkatan Standar Kompetensi Kelulusan - Partisipasi masyarakat dalam peningkatan Standar Mutu Kelembagaan dan Manajemen - Partisipasi masyarakat dalam peningkatan Standar Pembiayaan Pendidikan - Partisipasi masyarakat dalam peningkatan Standar Penilaian 						
	<p>2. Keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan pendidikan di sekolah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ikut serta dalam rapat pertemuan dilaksanakan setiap awal tahun, akhir semester, dan akhir tahun untuk membicarakan program-program sekolah. - Ikut serta dalam pameran dan 	Primer dan Sekunder	Wawancara mendalam dan studi dokumen	Orang tua siswa, Komite Sekolah, dan Kepala Sekolah SMP Negeri 278 dan SMP Negeri 225 Jakarta Barat, Ketua RT 06 Kec. Kalideres, LSM	Profil Sekolah, Dokumen Rencana Pengembangan Sekolah.	Banyaknya orang tua siswa dan masyarakat ikut hadir dalam acara yang diadakan sekolah	

No.	Faktor-faktor yang diamati	Jenis Data	Teknik Pengambilan Data	Sumber Data		Ukuran	Judgement
				Informan	Dokumen		
	<ul style="list-style-type: none"> - Telah ada aturan pengajuan proposal - Ada harapan aspirasi masyarakat akan didengarkan - Belum ada jaminan aspirasi masyarakat akan dilaksanakan 						
3. Penentruman	<ul style="list-style-type: none"> - Komunikasi telah berjalan baik - Sudah ada negosiasi antara masyarakat dengan pemerintah, masyarakat - Dimungkinkan untuk memberikan masukan secara lebih signifikan dalam penentuan hasil kebijakan publik - Proses pengambilan keputusan masih dipegang oleh pemegang kekuasaan 	Primer dan Sekunder	Wawancara mendalam dan studi dokumen	Orang tua siswa, Komite Sekolah, dan Kepala Sekolah SMP Negeri 278 dan SMP Negeri 225 Jakarta Barat, Ketua RT 06 Kec. Kalideres, LSM dan Direktorat PSMP.	Rencana Pengembangan Sekolah	Keaktifan masyarakat dalam penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah	

5.2.4 Implikasi Kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah

Konsep Manajemen Berbasis Sekolah merupakan kebijakan baru yang sejalan dengan paradigma desentralisasi dalam pemerintahan. Strategi apa yang diharapkan agar penerapan Manajemen Berbasis Sekolah dapat benar-benar meningkatkan mutu pendidikan.

Salah satu strategi adalah menciptakan prakondisi yang kondusif untuk dapat menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah, yakni peningkatan kapasitas dan komitmen seluruh warga sekolah, termasuk masyarakat dan orangtua siswa. Upaya untuk memperkuat peran kepala sekolah harus menjadi kebijakan yang mengiringi penerapan kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah.

Membangun budaya sekolah (*school culture*) yang demokratis, transparan, dan akuntabel. Termasuk membiasakan sekolah untuk membuat laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Model memajukan RAPBS di papan pengumuman sekolah yang dilakukan oleh Managing Basic Education (MBE) merupakan tahap awal yang sangat positif juga membuat laporan secara insidental berupa booklet, leaflet, atau poster tentang rencana kegiatan sekolah. Lebih baik lagi jika kepala sekolah dan ketua Komite Sekolah dapat tampil bersama dalam media tersebut.

Pemerintah pusat lebih memainkan peran monitoring dan evaluasi. Dengan kata lain, pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu melakukan kegiatan bersama dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah di sekolah, termasuk pelaksanaan block grant yang diterima sekolah.

Mengembangkan model program pemberdayaan sekolah. Bukan hanya sekedar melakukan pelatihan Manajemen Berbasis Sekolah, yang lebih banyak dipenuhi dengan pemberian informasi kepada sekolah. Model pemberdayaan sekolah berupa pendampingan atau fasilitasi dinilai lebih memberikan hasil yang lebih nyata dibandingkan dengan pola-pola lama berupa penataran Manajemen Berbasis Sekolah.

Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah menumbuhkan lingkungan yang kondusif pada pemberian perluasan tanggung jawab pelaksanaan pendidikan pada satuan sekolah, peningkatan peranan penentuan kebijakan operasional pada pelaksana di tingkat sekolah yang diimbangi dengan unsur transparansi

pengelolaan sekolah telah membawa dampak positif terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dan orang tua siswa, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pembelajaran yang lebih aktif menyenangkan dan efektif.

Semua unsur pembaharuan yang menghasilkan sejumlah kemajuan sekolah tersebut telah memberikan pengaruh yang baik pada peningkatan mutu hasil belajar. Penggalangan peranan masyarakat melalui tokoh masyarakat (*local innovator*) perlu diusahakan dan akan menjadi faktor keberhasilan upaya perintisan peningkatan partisipasi masyarakat dalam kerangka pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah.

Sosialisasi Manajemen Berbasis Sekolah di kalangan tokoh masyarakat sekitar masih perlu diteruskan dan dibantu oleh pemerintah daerah terutama di sekolah yang berada di daerah pekerja yang penuh kesibukan dan masyarakat ekonomi lemah. Sosialisasi di kalangan pengelola sekolah di berbagai tingkat serta LSM dapat pula menjadi penentu dalam mensukseskan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah.

Pihak sekolah sebagai unit pelaksana program Manajemen Berbasis Sekolah perlu mengadakan berbagai pendekatan kepada masyarakat seperti perlombaan atau pameran di sekolah dan antar sekolah dalam berbagai kegiatan guru atau sekolah, kegiatan pembelajaran dan hasil belajar siswa serta kegiatan-kegiatan yang diadakan Komite Sekolah atau orang tua siswa. Peningkatan kegiatan dan mutu berbagai segi hasil pendidikan serta peningkatan partisipasi masyarakat. Pembagian raport misalnya, dapat digunakan sebagai titik kulminasi kegiatan dan hasil kegiatan sekolah, dengan berbagai kegiatan pameran dan bazaar.